

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintahan negara sebagai organisasi pemangku jabatan dan kekuasaan tertinggi di suatu negara memiliki kewajiban yang sangat kompleks dalam menjalankan roda kepemimpinan. Tidak hanya menjalankan birokrasi dan administratif pemerintahan saja, pemerintah memiliki kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dari rakyatnya. Kedua hal ini diibaratkan seperti dua bagian mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kemakmuran sendiri dapat diukur dari terciptanya pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disebutkan oleh Manik (2013), menyebutkan bahwa tingkat kemakmuran yang tinggi berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan dari misi meningkatkan kemakmuran yang dilakukan oleh pemerintah, dapat diukur keberhasilannya dari peningkatan pada aspek pembangunan manusia.

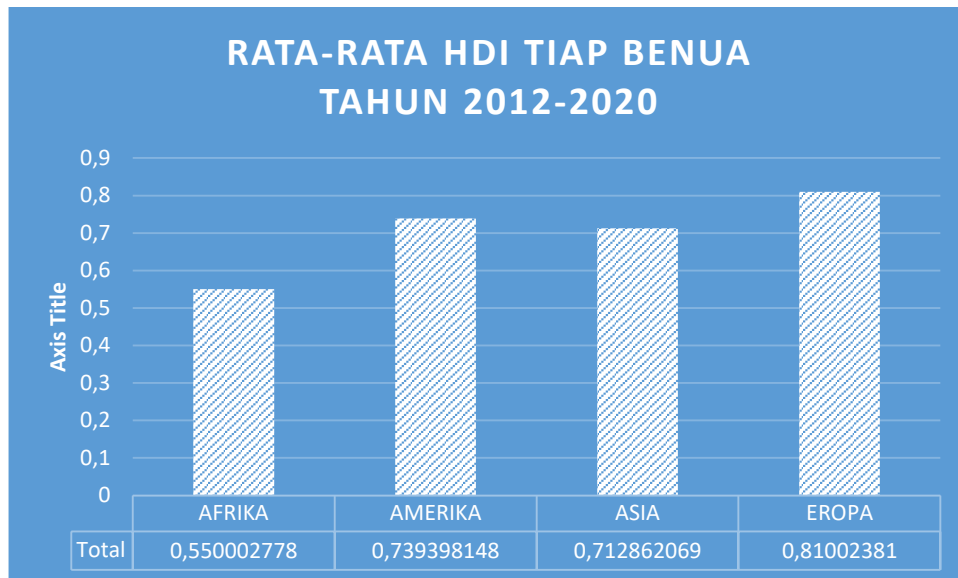
Setiap pemerintahan negara, pastinya diamanahi kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan juga kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Milenium yang dilakukan oleh 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Newyork pada bulan September tahun 2000. Pada deklarasi itu disebutkan mengenai tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals – MDGs*) yaitu untuk menempatkan manusia sebagai aspek

utama dalam upaya pembangunan. Terlepas dari deklarasi tersebut, bagi Negara Indonesia kewajiban untuk meningkatkan pembangunan manusia sendiri tersirat secara khusus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Maka dari itu sudah jelas bahwa pembangunan manusia menjadi fokus utama dari setiap negara di dunia.

United Nations Development Programme (UNDP) secara khusus membuat indikator yang menjadi patokan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan pembangunan manusia. Adapun indeks yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), yang mulai diperkenalkan pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Dalam publikasi ini, HDI didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau suatu proses untuk meningkatkan aspek kehidupan manusia. Aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang dimaksud adalah tingkat pendidikan yang memadai, tingkat kesehatan, dan standar hidup yang layak. Ketiga aspek dasar ini menjadi dimensi dasar dalam membentuk HDI. Secara khusus UNDP menetapkan empat elemen dasar dalam pembangunan manusia diantaranya produktivitas (*productivity*), keberlanjutan (*sustainability*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pemerataan (*equality*).

UNDP juga memiliki klaster tersendiri untuk mengelompokkan tingkat HDI dari setiap wilayah. Ada 4 kriteria yang diterapkan UNDP untuk mengelompokkan HDI yaitu HDI > 80 kategori HDI sangat tinggi, HDI 70-79 untuk kategori tinggi, serta

HDI 60-79 untuk kategori sedang. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengetahui lebih detail dari capaian peningkatan pembangunan manusia di setiap negara.



Sumber : *United Nations Development Programme* (Diolah)

Grafik 1.1. Rata-Rata HDI Tiap Benua Tahun 2012-2020

Berdasarkan grafik 1.1. yang menggambarkan rata-rata HDI untuk setiap benua dari tahun 2012 hingga tahun 2020 menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, terutama antara Benua Afrika dengan tiga benua lainnya. Dapat dilihat bahwa Benua Eropa memiliki rata-rata tingkat HDI tertinggi yaitu sebesar 0,81. Sedangkan untuk Benua Amerika dan Asia memiliki rata-rata tingkat HDI dikisaran angka 0,7. Bila dikategorikan menggunakan standarisasi katagori yang ditetapkan oleh UNDP maka ketiga benua ini masuk kedalam kategori tinggi. Artinya tingkat upaya pembangunan manusia di negara-negara yang berada dikawasan Benua Asia, Amerika dan Eropa memiliki tingkat pembangunan manusia yang tinggi. Fenomena ini berbanding terbalik dengan Benua Afrika yang memiliki rata-rata

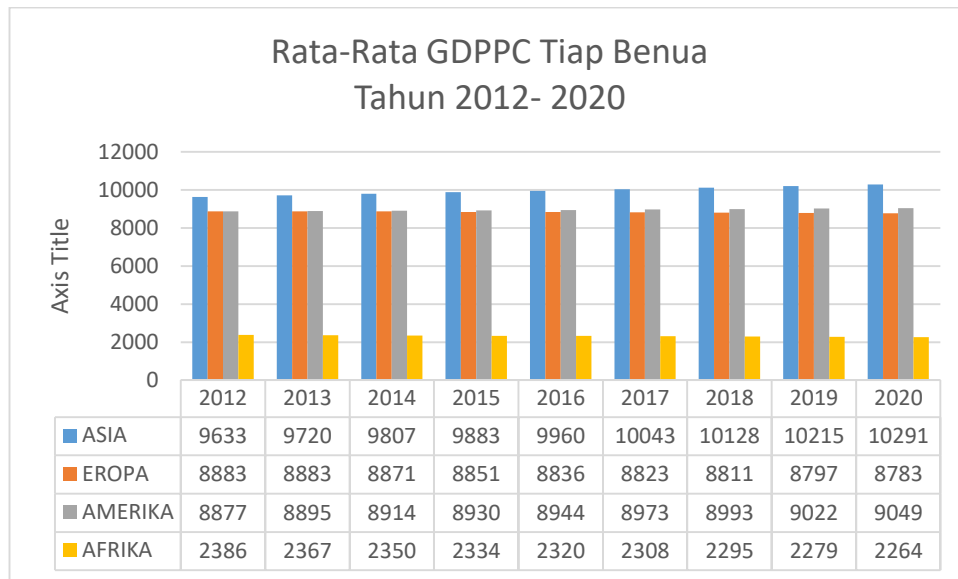
HDI pada klaster kategori rendah yaitu sebesar 0,55. Besar rata-rata HDI di Benua Afrika, menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pembangunan manusia di benua ini.

Faktor lain yang juga menyebabkan perbedaan pada tingkat HDI di berbagai wilayah ini disebabkan oleh salah satunya faktor yaitu pada aspek perekonomian. Faktor perekonomian menjadi salah satu faktor utama dari keberhasilan peningkatan HDI. Sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Amira Mohamed Emara (2020) dan I Komang Oka Artana Yasa dan Sudarsana Arka (2015), menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan *Human Development Index* (HDI). Pembicaraan mengenai pembangunan manusia suatu negara tidak akan lepas dari keadaan perekonomian. Seperti halnya HDI yang dapat dilihat dari tiga indikator utamanya, begitupun perekonomian di suatu negeri dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonominya, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kesempatan kerja.

Dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, salah satu tolak ukur indikator acuannya adalah tingkat *Gross Domestic Product Percapita* (GDPPC). Secara teoretis, GDPPC dapat dihitung dengan cara membagi antara jumlah penerimaan *Gross Domestic Product* (GDP) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan GDP itu sendiri dapat dihitung dari berbagai cara, salah satunya adalah dari sisi pengeluaran yaitu dengan menghitung tingkat konsumsi masyarakat (C), tingkat pertumbuhan investasi (I), jumlah pengeluaran pemerintah yang disalurkan untuk pembangunan infrastruktur agar menghasilkan *multiplier effect*

bagi perekonomian (G), dan jumlah ekspor bersih suatu negara (NX). Empat variabel ini menjadi indikator sekaligus instrumen baku dalam menentukan nilai GDP dan diturunkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

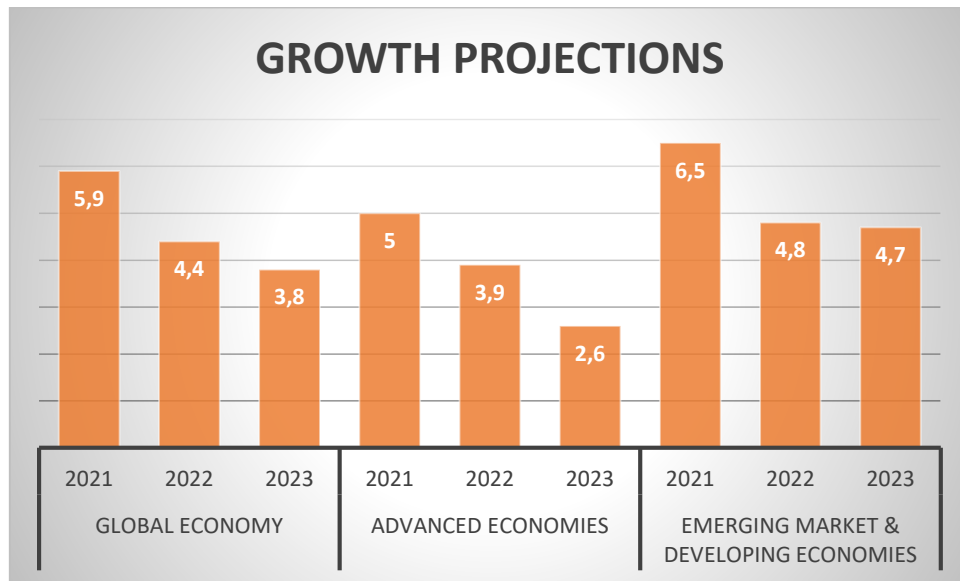
Dalam teori sederhana apabila salah satu variabel pembentuk GDP berubah maka akan mengubah nilai GDP, dengan setiap variabel tersebut memiliki sifat *multiplier effect*. Artinya perubahan sebesar satu satuan hitung pada salah satu variabel pembentuk GDP tidak akan mengubah sebesar satu satuan hitung yang sama terhadap GDP, karena secara tidak langsung variabel lain terpengaruh dan mempengaruhi GDP. Apabila pemerintah melakukan intervensi untuk meningkatkan perekonomian dari salah satu variabel maka imbasnya akan memberikan dampak besar bagi pertumbuhan GDP. Adapun instrumen pemerintah dalam mengatur, mengupayakan dan menstimulus perekonomian adalah dengan menggunakan dua kebijakan utama yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dua kebijakan ini diibaratkan seperti dua buah sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Pemerintah tidak bisa menggunakan kebijakan untuk mengintervensi perekonomian hanya dari sisi konsumen saja, tetapi juga perlu ada intervensi dari sisi produsen. Oleh karena itu dua kebijakan ini menjadi instrumen utama dalam mengendalikan perekonomian.



Sumber : *World Bank* (Diolah)

Grafik 1.2. Rata-rata *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC) Tiap Benua Tahun 2012-2020

Berdasarkan grafik rata-rata *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC), dapat dilihat bahwa rata-raya GDPPC di setiap benua mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Peningkatan ini merupakan implikasi dari kinerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan perekonomian negara sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun jika dilakukan perbandingan dari setiap benua dapat dilihat bahwa Benua Afrika merupakan benua yang memiliki tingkat penerimaan GDPPC terkecil dibandingkan dengan Benua Asia, Amerika dan Afrika. Adapun rata-rata *Gross Domestic Product Percapita* (GDPPC) untuk Benua Afrika hanya berkisar diangka duaribuan saja, hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan benua yang lainnya.

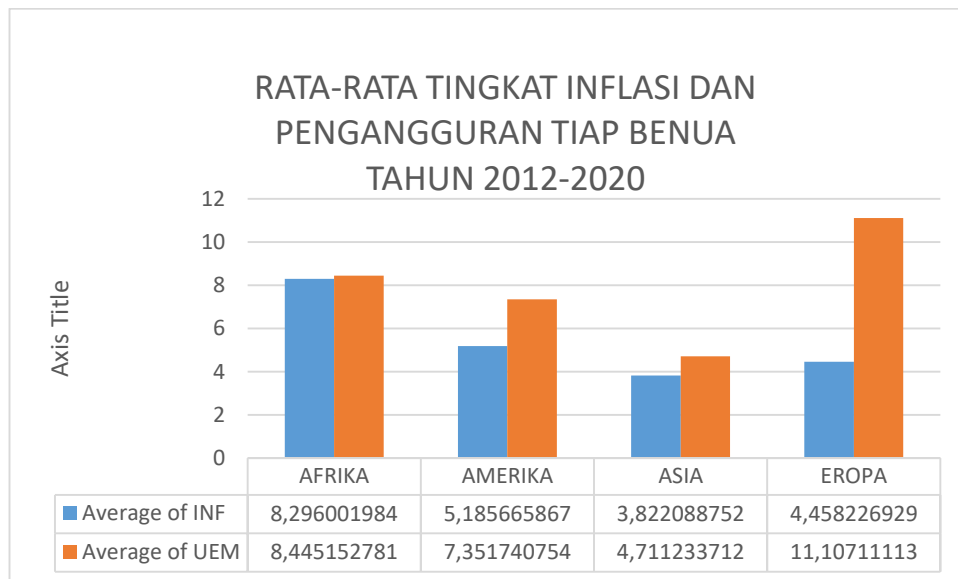


Sumber : *International Monetary Fund* (Diolah)

Grafik 1.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Setiap negara pastinya memiliki hambatan dan permasalahan tersendiri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun semenjak tiga tahun terakhir, perekonomian dunia banyak mengalami hambatan besar, dari mulai adanya pandemic covid-19 hingga tersulutnya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Hambatan global ini berdampak besar terhadap perekonomian di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh adanya efek domino yang terjadi akibat permasalahan ekonomi. Pertumbuhan yang sedang dibangun kembali oleh setiap negara setelah terlepas dari cengkaman pandemic Covid-19 ini tidak bisa berjalan dengan mulus, akibat adanya dampak geopolitik Rusia dan Ukraina. Permasalahan ini menyebabkan informasi yang simpang siur mengenai perekonomian dunia pada tahun 2023. *International Monetary Fund* (IMF) menyebutkan bahwa akan terjadi penurunan ekonomi dunia sebesar 0,6 %. Penurunan ini sangat berdampak bagi perekonomian

dalam negeri. Salah satu dampak yang dirasakan adalah peningkatan harga barang yang diakibatkan oleh adanya inflasi.



Sumber : *World Bank* (Diolah)

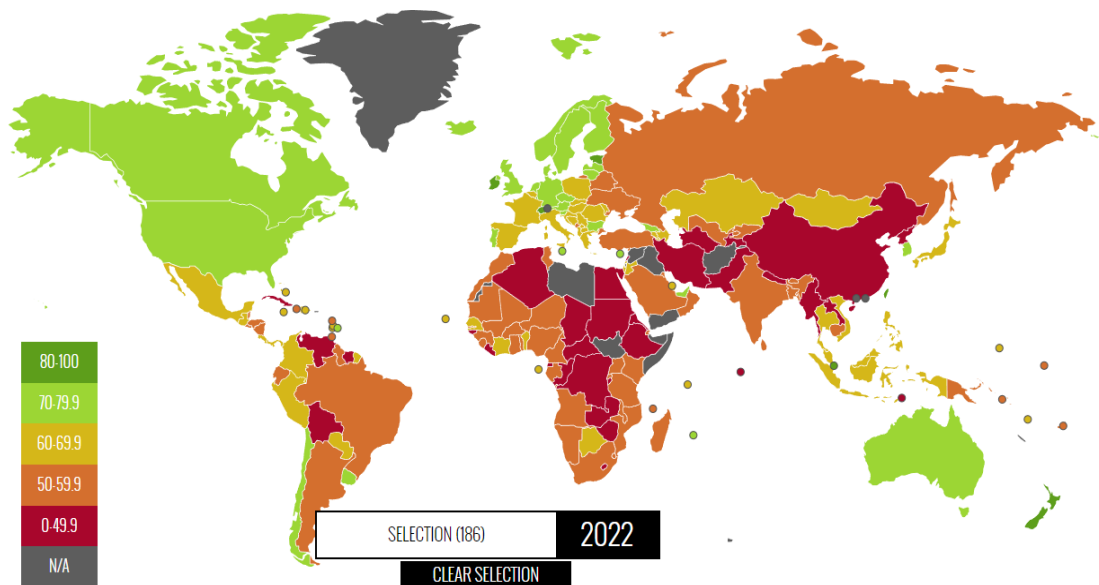
Grafik 1.4. Rata-rata Tingkat Inflasi dan Pengangguran Di Tiap Benua

Tahun 2012-2020

Permasalahan inflasi sudah menjadi perbincangan yang lumrah dibicarakan oleh setiap ekonom dunia. Terutama di negara berkembang, permasalahan inflasi menjadi faktor pemicu yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan ekonomi lainnya. Salah satu permasalahan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan inflasi adalah permasalahan pengangguran. Berdasarkan teori Kurva Phillips yang dikemukakan oleh A.W. Phillips menyatakan bahwa adanya *trade off* antara

inflasi dengan tingkat pengangguran. Teori ini menyebutkan bahwa makin tinggi pertumbuhan ekonomi akan diiringi dengan makin tingginya tingkat inflasi, dan pada saat itu akan menyebabkan makin banyaknya lapangan pekerjaan dan menurunnya tingkat pengangguran. Namun teori ini terbantahkan oleh adanya lonjakan pengangguran dan dibarengi dengan tingginya laju inflasi yang dirasakan oleh negara Amerika pada tahun 1970 silam.

Permasalahan mengenai inflasi, pengangguran dan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna merealisasikan pembangunan manusia akan tetap menjadi permasalahan baku yang dihadapi oleh setiap negara, terutama negara berkembang. Namun seiring dengan makin terbukanya akses informasi dan teknologi, membuat setiap negara mencoba untuk membuka mata untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Perkembangan ini menghasilkan suatu kebebasan ekonomi di setiap negara. Adanya kebebasan ini mampu memberikan ruang bagi negara untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mendapatkan pekerjaan, memproduksi barang dan jasa dan bahkan berinvestasi. Dengan kata lain kebebasan ekonomi akan menjadi pendorong dan indikator kemajuan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gwartney (2007), bahwa makin tinggi tingkat kebebasan ekonomi suatu negara maka akan makin tinggi juga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : Databoks (Diolah)

Grafik 1.5. Peta Persebaran Economic Freedom Index

Kebebasan ekonomi di suatu negara dapat diukur dari adanya indikator kebebasan ekonomi yang dipublikasikan oleh Heritage. Lembaga ini selalu mempublikasikan keadaan dari kebebasan perekonomian dari setiap negara di dunia. Dapat dilihat dari peta persebaran indeks kebebasan ekonomi yang dikeluarkan pada tahun 2022, bahwa sebagian besar negara masih kurang dalam pengupayaan kebebasan ekonomi. Terlihat dari adanya degradasi warna cokelat yang dominan di bagian Benua Afrika, Asia Utara hingga sebagian kecil Benua Eropa. Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul *Principles of Political Economy and Taxation* pada tahun

1817 menyebutkan mengenai teori sistem pengupahan, permodalan yang memiliki hubungannya dengan kestabilan politik di suatu negara. Memang sesuai dengan yang telah dikemukakan di awal bahwa saat ini ekonomi dunia sedang mengalami guncangan geopolitik, yang hal itu dampaknya juga dapat terlihat dari makin rendahnya tingkat kebebasan ekonomi di belahan negara yang terdampak secara langsung, baik secara geografi maupun hubungan bilateral dan multilateral.

Tentunya perlambatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Adanya hubungan multilateral dan bilateral dapat menjadi katalisator solusi untuk menghegemoni ketimpangan yang terjadi akibat adanya kompilasi masalah yang mengguncangkan sendi-sendi perekonomian negara. Terkhusus Negara Indonesia yang makin aktif melakukan kerjasama dengan berbagai negara. Salah satunya adalah dengan ikut serta dan aktif pada forum kerjasama G-20, ASEAN, AFTA, dan masih banyak lagi. Keaktifan ini bisa menjadi tameng dan benteng pertahanan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan juga merealisasikan misi pembangunan manusia.

Namun dalam menjalankan roda kepemimpinan dan mengatur perekonomian negara, pasti terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemerintah. Faktanya kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengatasi masalah perekonomian akan dihadapkan dengan masalah pelik yang memiliki efek domino baik secara langsung dari perekonomian itu sendiri maupun dari aspek lainnya yang berhubungan dengan perekonomian. Salah satu faktor penghambat dari penerapan kebijakan perekonomian yang dilakukan pemerintah adalah dari jalur birokrasinya sendiri yang masih adanya indikasi korupsi dan gratifikasi. Sehingga kebijakan yang

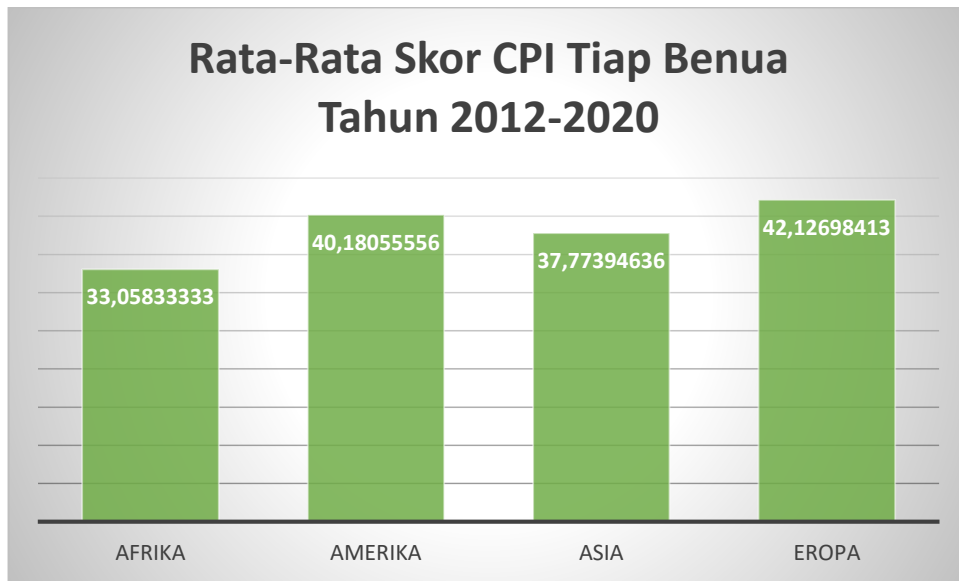
dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan secara lancar dari hulu hingga hilir. Dari pemerintah pusat hingga ke bagian birokrasi terkecil praktik ini kerap kali ada dan menjadi virus yang menghambat upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian.

Jika dilihat secara historis maka praktik korupsi di Indonesia memang sudah ada sejak zaman kolonialisme. Pada masa itu, serikat dagang yang dibentuk Belanda yaitu *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* bisa berkuasa sampai lebih dari tiga abad hingga tersandang julukan negara di dalam negara untuk VOC. Namun pada akhirnya disebabkan terindikasi tindak korupsi di dalam sendi birokrasi VOC, menyebabkan serikat dagang ini mengalami kebangkrutan. Dari sejarah ini dapat diambil pelajaran bagi kita yaitu sekelas VOC yang memiliki julukan negara di dalam negara dan berdiri hampir tiga abad saja bisa hancur karena adanya korupsi. Bagaimana dengan Negara Indonesia, khususnya yang baru tujuh puluh tahun lebih merdeka sebagai negara berdaulat, tentunya akan bernasib sama apabila tindak korupsi ini masih ada pada setiap sendi birokrasinya.

Banyak penelitian yang mencoba menggali lebih jauh mengenai dampak dari tindakan korupsi terhadap perekonomian suatu negara dan dari setiap penelitian tersebut menyebutkan bahwa adanya tidak korupsi menjadi virus dan dinding penghalang dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Namun terdapat pula hasil dari studi empiris yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa negara memiliki pengaruh positif antara korupsi terhadap perekonomian. Terdapat juga argumentasi menarik yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti Leff (1964); Leys (1965); dan Lui (1985) yang menyebutkan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pembayaran insentif untuk menghapus peraturan pemerintah yang tidak efisien, mempercepat

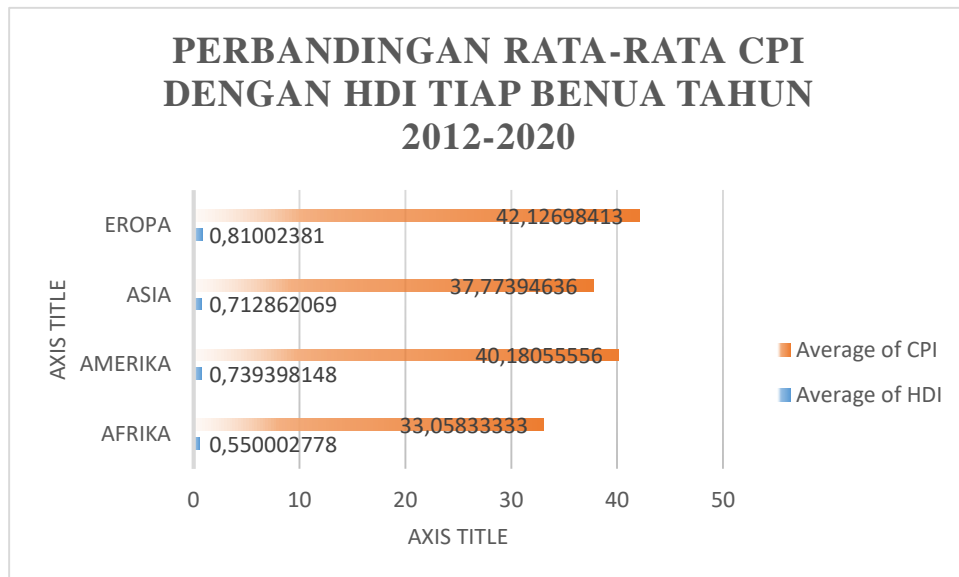
birokrasi serta untuk memudahkan izin usaha yang lebih cepat dengan cara menyuap pejabat publik. Argumentasi ini seakan menjadi paradoks dengan sebagian hasil studi empiris yang menyatakan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan pendapat dari ketiga ahli tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Wedeman (1997) menyatakan bahwa ada banyak negara yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi walaupun dihadapkan dengan masalah tindak korupsi yang cukup tinggi.

Perbedaan pendapat yang terjadi mengenai efek dari adanya tindak pidana terhadap pertumbuhan ekonomi memang memiliki rasionalisasi yang tepat. Namun jika dikaitkan dengan Teori *Butterfly Effect*, yang menyebutkan bahwa adanya dampak besar yang diakibatkan oleh sesuatu hal yang kecil. Maka dapat dikatakan sekecil apa pun korupsi di suatu negara, disinyalir akan memberikan efek yang besar pula terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, terutama upaya pembangunan dan pertumbuhan. Memang benar adanya korupsi tidak memiliki pengaruh yang berarti pada pertumbuhan ekonomi, karena masih terjadinya pertumbuhan walaupun korupsi ada di suatu negara tersebut. Namun pemerataan yang dihasilkan oleh pertumbuhan tersebut tidak terjadi akibat terhalang oleh tindak korupsi.



Sumber : *Transparency.org* (Diolah)

Grafik 1.6. Rata-Rata Skor CPI Tiap Benua Tahun 2012-2020



Sumber : *United Nations Development Programme (UNDP)* dan *Transparency.org*

Grafik 1.7. Perbandingan Skor CPI dengan HDI Tiap Benua

Tahun 2012-2020

Berdasarkan grafik perbandingan antara rata-rata tingkat CPI dengan HDI di tiap benua, dapat diketahui bahwa makin bersihnya suatu wilayah dari tindak pidana korupsi yang diwakili dengan makin tingginya tingkat CPI, menunjukkan hubungan yang berbanding lurus dengan makin tingginya tingkat HDI di suatu wilayah. Melihat efek yang ditimbulkan dari adanya korupsi di suatu negara atau wilayah, maka dapat dikatakan bahwa korupsi adalah variabel penghambat dari upaya merealisasikan pembangunan manusia. Sebaik apa pun system yang dibuat oleh pemerintah untuk menjalankan roda kepemimpinan dan merealisasikan segala rencana pembangunan, hal itu akan sia-sia saja bila korupsi sebagai virus pengganggu dibiarkan mengakar radikal. Untuk melihat seberapa besar tingkat pidana korupsi di suatu negara, terdapat suatu indeks yang dipakai untuk mengukurnya. Indeks tersebut adalah *Corruption perception index (CPI)* yaitu suatu indeks yang menggambarkan tingkat korupsi dengan interval indeks dari 0-100. Angka tersebut menunjukkan makin besar tingkat CPI di suatu negara atau wilayah maka suatu negara atau wilayah tersebut dikategorikan sebagai negara yang bersih dari tindak pidana korupsi dan *vice versa*. Indeks ini pertama kali dipublikasikan oleh *Transparency* pada tahun 1995. Berdasarkan data CPI yang dipublikasikan tahun 2021, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan skor dari CPI Negara Indonesia berada pada angka 31 dan berada jauh dari negara tetangganya sesama pendiri ASEAN yaitu Singapura dan Malaysia.

Adanya tingkat korupsi di suatu negara diibaratkan seperti lumut yang menghalangi laju air dari hulu ke hilir. Upaya pemerintah dalam pemenuhan hak

rakyat sebagai implementasi dari pemenuhan pemerataan pembangunan dan wujud dari terciptanya pembangunan manusia yang ideal, akan terganggu oleh tindak pidana korupsi yang terjadi di sendi birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu melihat fenomena ini dan sesuai dengan literatur dan penelitian sebelumnya yang membahas efek dari korupsi, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh dari mengenai korupsi, kebebasan ekonomi dan variabel ekonomi makro terhadap upaya pembangunan manusia. Penulis bermaksud untuk meneliti dan menganalisis dengan lebih komprehensif dan holistik mengenai efek moderasi dari korupsi terhadap pengaruh variabel makro dalam mempengaruhi upaya pembangunan manusia di 60 negara berkembang dari 4 benua yaitu Benua Asia, Amerika, Afrika dan Eropa. Maka penulis melakukan penelitian tersebut dengan judul **“Relasi Korupsi, Kebebasan Ekonomi dan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Upaya Pembangunan Manusia.”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan dari tingkat *Human Development Indeks* (HDI), pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC), inflasi, pengangguran, tingkat korupsi dan *Economic Freedom Indeks* (EFI) di Benua Asia, Amerika, Afrika dan Eropa?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC), inflasi, pengangguran, korupsi dan *Economic freedom*

index terhadap *Human Development Index* (HDI) di Benua Asia, Amerika, Afrika dan Eropa.?

3. Bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC), inflasi, dan pengangguran terhadap *Human Development Index* (HDI) yang dimoderasi korupsi di Benua Asia, Amerika, Afrika dan Eropa.?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan dari tingkat *Human Development Indeks* (HDI), tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC), inflasi, pengangguran, tingkat korupsi dan *Economic Freedom Indeks* (EFI) di Benua Asia, Amerika, Afrika dan Eropa.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC), inflasi, pengangguran, korupsi dan *Economic freedom index* terhadap *Human Development Index* (HDI) di Benua Asia, Amerika, Afrika dan Eropa..
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC), inflasi, dan pengangguran terhadap *Human Development Index* (HDI) yang dimoderasi korupsi di Benua Asia, Amerika, Afrika dan Eropa..

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya guna memberikan cakrawala pemahaman yang lebih luas khususnya bagi kalangan akademisi.

1.4.2. Kegunaan Empiris

Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pasundan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Sen's Development Theory

Dalam buku yang berjudul *Development as Freedom* yang ditulis oleh Amartya Sen (1999) disebutkan bahwa pembangunan memiliki arti kebebasan, karena kebebasan itu sendiri merupakan tujuan utama dari upaya pembangunan dan sarana utama dari pembangunan. Sen berpendapat bahwa pembangunan dapat ditingkatkan dengan demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan penegakan hak-hak fundamental manusia itu akan dapat terealisasi dengan adanya pemerintahan yang jujur, bersih dan baik.

Pembangunan merupakan suatu proses perluasan kebebasan manusia. Hal yang dimaksud adalah bahwa peningkatan kebebasan yang memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, upaya pembangunan harus bisa menghilangkan benteng yang menghalangi kebebasan tersebut, seperti peluang ekonomi yang buruk serta deprivasi sosial yang sistematis, pengabaian fasilitas publik serta intoleransi atau aktivitas berlebihan dari negara-negara represif.

Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Sen menitikberatkan bahwa pembangunan itu didasarkan oleh beberapa aspek yaitu :

1. Kebebasan

Kebebasan merupakan inti dari *Sens Development Theory*. Amartya Sen berpendapat bahwa kebebasan merupakan tujuan utama pembangunan. Kebebasan di sini mencakup kebebasan politik, ekonomi, dan sosial. Kebebasan politik berkaitan dengan hak-hak sipil, partisipasi politik, dan otonomi individu dalam pengambilan keputusan. Kebebasan ekonomi mencakup akses terhadap peluang ekonomi, pilihan pekerjaan, dan kontrol atas sumber daya. Kebebasan sosial melibatkan non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

2. Kemampuan (*Capabilities*)

Kemampuan merujuk pada kapasitas individu untuk berfungsi dan melakukan berbagai aktivitas yang dianggap penting dalam kehidupan. Kemampuan meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, perumahan, dan layanan dasar lainnya. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memperluas kemampuan individu untuk memiliki kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan.

3. Penghapusan ketidakbebasan

Sen berpendapat bahwa pembangunan harus bertujuan untuk menghilangkan berbagai bentuk ketidakbebasan dan hambatan yang menghalangi

manusia dalam mengembangkan kemampuan dan mencapai kesejahteraan. Ketidakbebasan ini bisa berupa kemiskinan, ketidakadilan sosial, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan.

4. Pemerataan akses

Sens Development Theory menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap peluang dan sumber daya yang penting bagi pembangunan manusia. Hal ini termasuk akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. aspek kebebasan.

Dalam pemikirannya ini, Sen mengungkapkan berbagai variabel baru yang bersifat non-materil dalam menjelaskan konsep dari pembangunan. Pemikirannya ini menjadi warna baru pada paradig pemikiran ekonomi modern Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi individu dan masyarakat.

2.1.2. *Sollow-Swan Theory*

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yang juga dikenal sebagai teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, dikembangkan oleh Robert M. Solow (1956) dan T.W. Swan (1956). Teori ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Model Solow-Swan mengintegrasikan elemen-elemen penting seperti pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan output yang saling berinteraksi untuk menjelaskan mekanisme pertumbuhan ekonomi.

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi beroperasi dalam jangka panjang pada tingkat output yang stabil. Fungsi produksi dalam model Solow-Swan memungkinkan substitusi antara kapital dan tenaga kerja, sehingga negara dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tingkat output yang optimal.

Salah satu elemen kunci dalam teori ini adalah akumulasi kapital, yang mengacu pada peningkatan stok modal melalui investasi. Model Solow-Swan mengakui bahwa akumulasi kapital dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengasumsikan adanya penurunan tingkat pengembalian kapital seiring bertambahnya stok modal. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lebih didorong oleh kemajuan teknologi daripada hanya peningkatan kapital.

Pertumbuhan penduduk juga diperhitungkan dalam teori ini. Tingkat pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dan investasi yang memadai, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, teori Solow-Swan mengakui pentingnya kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemajuan teknologi mencakup inovasi, peningkatan pengetahuan, dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Hal ini memungkinkan efisiensi produksi yang lebih tinggi, peningkatan produktivitas, dan peningkatan output secara keseluruhan.

Dalam kesimpulannya, teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. Dengan mempertimbangkan akumulasi kapital, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan interaksi output, teori ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2.1.3. Teori Inflasi Keynes

Salah satu teori inflasi yang sangat terkenal di kalangan ekonom dunia, salah satunya adalah teori inflasi yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Dia mendasari teorinya ini berdasar pada teori makro yang dikemukakannya. Menurut Keynes, inflasi terjadi akibat adanya keinginan manusia untuk memenuhi segala keinginan hidupnya melebihi batas kemampuan ekonominya.

Menurut pandangan ini, proses inflasi tidak lebih dari persaingan memperebutkan bagian kekayaan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan lebih dari yang dapat disediakan oleh masyarakat. Proses perjuangan ini akhirnya diterjemahkan menjadi kenyataan bahwa permintaan masyarakat akan

komoditas selalu melebihi pasokan komoditas. (Munculnya apa yang disebut kesenjangan inflasi) Kesenjangan inflasi terjadi karena kelompok orang ini berhasil mengubah keinginan mereka menjadi permintaan barang yang efektif. Dengan kata lain, mereka berhasil mendapatkan dana untuk mengubah keinginan mereka menjadi rencana untuk membeli barang-barang yang didukung secara finansial. Salah satu kelompok tersebut mungkin adalah pemerintah itu sendiri, yang berusaha mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil masyarakat dengan mencetak uang baru untuk mendanai defisit anggaran. Kelompok ini juga bisa berupa serikat pekerja, yang berusaha mendapatkan kenaikan upah bagi para anggotanya yang melebihi pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (Budiono, 1995: 163-165).

2.1.4. Teori Pengangguran Keynes

Dalam mengatasi pengangguran, teori Keynesian bertentangan dengan teori klasik. Menurut teori Keynesian, pengangguran sebenarnya disebabkan oleh permintaan agregat yang rendah. Dengan demikian, keterlambatan pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi melainkan rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat didelegasikan kepada mekanisme pasar bebas. Ketika angkatan kerja meningkat, upah turun, yang buruk daripada menguntungkan, karena turunnya upah berarti orang memiliki daya beli yang lebih rendah untuk barang. Pada akhirnya, produsen akan merugi dan tidak mampu menyerap tenaga kerja. Intervensi pemerintah dianjurkan untuk menjaga tingkat permintaan agregat sehingga pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja (Soesastro et al., 2005).

2.1.5. Teori *Rent-Seeking*

Teori *Rent-Seeking*, yang juga dikenal sebagai perilaku mencari rente, mengacu pada upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan memanfaatkan regulasi atau kebijakan pemerintah yang ada. Perilaku ini terjadi ketika individu atau bisnis menggunakan pengaruh mereka terhadap pemerintah untuk menghambat pasokan atau meningkatkan permintaan sumber daya, seperti yang dijelaskan oleh Yustika pada tahun 2006 (Raharjo, 2015). Aktivitas mencari rente dapat terlihat dalam tindakan seperti melakukan lobi untuk mendapatkan lisensi atau izin (misalnya, pengusaha yang melakukan lobi kepada pemerintah untuk mendapatkan izin usaha), yang pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan dampak negatif bagi mereka yang terkena akibat diabaikannya kebijakan pemerintah. Secara umum, aktivitas mencari rente dianggap negatif karena melibatkan konflik kepentingan antara pengusaha dan mereka yang berkuasa (pemerintah) untuk mengubah atau mengabaikan kebijakan ekonomi demi keuntungan para pencari rente, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi berbagai pihak (Raharjo, 2015).

Menurut Little (2002), perilaku mencari rente dipandang sebagai pengeluaran sumber daya untuk mempengaruhi atau memanipulasi kebijakan ekonomi demi keuntungan para pencari rente. Terdapat dua pendekatan dalam memahami mencari rente. Pendekatan pertama adalah teori ekonomi klasik tentang mencari rente, dan pendekatan kedua adalah perspektif ekonomi politik. Anne O. Krueger memperkenalkan teori mencari rente pada tahun 1974 ketika membahas

praktik memperoleh kuota impor, di mana kuota impor dianggap sebagai perbedaan antara harga batas dan harga domestik (Yustika: 2012: 107). Mencari rente diakui sebagai tindakan yang cenderung merusak, berbahaya, atau pemborosan, yang berarti dampaknya negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Secara hukum, terdapat dua kecenderungan dalam mencari rente: pertama, adanya hukum yang mendukung keistimewaan pasar bagi individu tertentu sementara merugikan yang lain; dan kedua, pembagian kekayaan melalui tindakan tanpa pemungutan suara yang bertujuan untuk mengubah hukum agar individu atau kelompok tertentu mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada yang lainnya. Aktivitas mencari rente dapat didefinisikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan regulasi pemerintah. Aktivitas mencari rente dapat didefinisikan sebagai upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan regulasi pemerintah (Yustika: 2012: 107).

2.1.6. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan baru, yang juga dikenal sebagai teori pertumbuhan endogen, dikembangkan oleh Paul M Romer (1986) dan Robert Lucas (1988) sebagai kritik terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solow yang tidak dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara memadai. Teori neoklasik didasarkan pada beberapa asumsi pokok: Pertama, pendapatan per kapita suatu negara ditentukan oleh produksi yang menggunakan dua faktor, yaitu kapital dan tenaga kerja. Kedua, fungsi produksi memiliki sifat constant returns to scale

(CRS), yang berarti jika semua faktor produksi diperbesar secara proporsional, output akan meningkat secara proporsional juga. Ketiga, peningkatan dalam faktor produksi mengikuti hukum diminishing returns to scale, yang berarti peningkatan output yang diperoleh dari penambahan satu unit faktor produksi terakhir lebih kecil daripada peningkatan output yang diperoleh dari penambahan satu unit faktor produksi sebelumnya. Keempat, pertumbuhan penduduk dianggap eksogen, konstan, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti komposisi faktor produksi dan pendapatan masyarakat. Kelima, tingkat tabungan dianggap sebagai bagian tetap dari pendapatan nasional.

Selanjutnya, terdapat beberapa ciri penting dalam cara pandang teori neoklasik terhadap teknologi. Pertama, teknologi dianggap eksogen, yaitu muncul secara tiba-tiba dalam proses produksi tanpa adanya faktor-faktor internal yang mempengaruhi. Kedua, teknologi dianggap sebagai pure public goods yang memiliki karakteristik sebagai non-rival goods, artinya teknologi dapat digunakan oleh banyak orang tanpa adanya persaingan, dan juga non-excludable goods, yang berarti manfaat dari teknologi tidak dapat dibatasi hanya untuk kelompok pengguna tertentu atau bahkan hanya untuk satu negara. Setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi dengan biaya rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali.

Berdasarkan kritik terhadap teori neoklasik tersebut, teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa salah satu kelemahan model neoklasik dalam menjelaskan pola pertumbuhan jangka panjang adalah karena spesifikasinya yang

salah. Sebelumnya, kapital hanya merujuk pada mesin-mesin produksi dan tidak mencakup modal manusia. Selain itu, teori neoklasik juga kurang memperhatikan adanya proses learning-by-doing yang terus meningkat seiring dengan masuknya pengetahuan dan ide baru melalui produk baru, aliran modal, atau saluran transmisi lainnya ke dalam perekonomian. Dengan adanya kontribusi learning-by-doing, pertumbuhan suatu negara dapat tetap tinggi dan berkelanjutan. Dalam teori pertumbuhan endogen, semua elemen di atas termasuk dalam fungsi produksi secara keseluruhan, yang dapat memiliki hubungan linear dengan kapital. Pengertian kapital dalam konteks ini mencakup kapital fisik dan kapital manusia.

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Guna memperluas cakrawala pemahaman juga memperkaya perspektif dalam penelitian ini, maka disamping ditunjang dengan landasan literatur teori juga ditunjang dengan berbagai hasil dari penelitian sebelumnya yang linear dengan penelitian yang sedang dilaksanakan ini.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Keterangan
Pengaruh Korupsi Terhadap Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia.	<p>Nama Peneliti : Yoga Kus Subandoro & Hidayat Amir</p> <p>Hasil Penelitian : Variabel korupsi tidak berperan sebagai variabel moderasi melainkan berperan sebagai variabel independen, bersama-sama dengan variabel pengeluaran pemerintah dan GDP dalam mempengaruhi pembangunan manusia</p> <p>Persamaan :</p> <p>a) Menggunakan variabel korupsi sebagai variabel moderasi.</p>

	<p>b) Menggunakan jenis data panel c) Menggunakan variabel <i>Human Development Index</i> sebagai variabel dependent</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a) Menggunakan variabel makro sebagai variabel independen b) Jumlah negara yang digunakan dalam penelitian berjumlah 107 negara berkembang. c) Variabel kontrol menggunakan variabel <i>Economic freedom index</i></p>
<p>The Impact of Corruption, Economic Freedom, and Macroeconomic Variables on Human Development: A Cross-Country Analysis</p>	<p>Nama Peneliti : Akhtiar Ahmed</p> <p>Hasil Penelitian : Penelitian ini menemukan bahwa tingkat korupsi, tingkat kebebasan ekonomi, GDP per kapita, inflasi, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi memiliki pengaruh negatif yang kuat terhadap pembangunan manusia.</p> <p>Persamaan :</p> <p>a) Penggunaan variabel korupsi sebagai variabel independen b) Penggunaan variabel <i>Human Development Index</i> (HDI) sebagai variabel dependen</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a) Variabel korupsi juga bertindak sebagai variabel moderasi. b) Sampel data yang digunakan adalah 107 negara berkembang c) Penggunaan model analisis <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)</p>

<p>Analysis of Correlation among HDI (<i>Human Development Index</i>), Violence, and <i>Corruption perception index</i></p>	<p>Nama Peneliti : Andre Francisco, Leticia Costa Curta, dan Lilian da Silva Dias</p> <p>Hasil Penelitian : Menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara CPI dengan HDI. Namun, ketika dilakukan analisis dengan mempertimbangkan pemisahan HDI berdasarkan kalsifikasi, terlihat bahwa korelasi antara HDI dan CPI secara statistik signifikan hanya untuk negara-negara yang diklasifikasikan sebagai "pembangunan manusia yang sangat tinggi". Untuk kelompok klasifikasi IPM lainnya, korelasi antara IPM dan IHK tidak signifikan.</p> <p>Persamaan : Untuk mencari relasi antara CPI dengan HDI</p> <p>Perbedaan: Menggunakan CPI sebagai variabel independen sekaligus variabel yang memoderasi variabel independen</p>
<p>Corruption and Human Development</p>	<p>Nama Peneliti : Selçuk Akçay</p> <p>Hasil Penelitian : Hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara indeks korupsi dan pembangunan manusia. Bukti empiris dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara yang lebih korup cenderung memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih rendah. Singkatnya, penelitian ini memperluas daftar konsekuensi negatif dari korupsi dan berpendapat bahwa korupsi dalam segala aspeknya menghambat pembangunan manusia.</p> <p>Persamaan : Mencari relasi antara korupsi dengan pembangunan manusia, dengan menempatkan HDI sebagai variabel dependen</p> <p>Perbedaan: Variabel korupsi tidak hanya bertindak sebagai variabel independen, tetapi juga variabel moderasi.</p>

<p><i>Corruption, Economic Freedom, and Human Development: Evidence from Sub-Saharan Africa</i></p>	<p>Nama Peneliti : Abigail A. Adams, Lawrence M. Cooley, dan Thomas J. Prusa</p> <p>Hasil Penelitian : Studi ini menunjukkan bahwa korupsi dan kebebasan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan manusia di 45 negara di Sub-Sahara Afrika. Kebebasan ekonomi berkontribusi positif terhadap pembangunan manusia, sementara tingkat korupsi berkontribusi negatif.</p> <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan data panel dan model regresi linear berganda Bertujuan untuk menganalisis pengaruh korupsi dan kebebasan ekonomi terhadap pembangunan manusia <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Variabel korupsi juga bertindak sebagai variabel moderasi. Sampel data yang digunakan adalah 107 negara berkembang Penggunaan model analisis <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)
---	---

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Pertumbuhan *Gross Domestic Product Percapita* (GDPPC) Terhadap *Human Development Index* (HDI)

Berdasarkan pendapat dari Sukirno (2003) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan disaat output perkapita mengalami peningkatan untuk jangka panjang yang mempengaruhi pada 3 indikator yaitu proses output perkapita dan periode masa secara jangka panjang. Sedangkan

menurut Ali Ibrahim Hasyim (2016) pertumbuhan ekonomi terjadi oleh adanya tiga komponen dasar, yaitu peningkatan pada persediaan barang secara terus menerus, kemajuan teknologi dan penggunaannya secara meluas dan merata. Adapun patokan untuk melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari peningkatan tingkat pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC). Upaya untuk menumbuhkan perekonomian bukan hanya sebatas gambaran singkat dalam lingkup perekonomian saja, tetapi lebih dari itu secara agregat pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan manusia.

UNDP telah menetapkan indikator dalam menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia yang dirangkum dalam *Human Development Index* (HDI) yaitu salah satunya adalah paritas daya beli masyarakat, yang merupakan salah satu komponen pembentuk HDI dari perspektif ekonomi. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka akan menyebabkan semakin baik pula paritas daya belinya, dan akhirnya adanya peningkatan yang sama terhadap pembangunan manusia yang digambarkan dengan peningkatan HDI. Hal ini juga sejalan dengan

2.2.2. Hubungan Inflasi Terhadap *Human Development Index* (HDI)

Inflasi merupakan salah satu permasalahan umum yang pasti dihadapi oleh setiap negara. Stabilitasnya inflasi menjadi prasyarat utama dalam proses pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan ketidakstabilan pada perekonomian dan memberikan efek domino bagi pelaku ekonomi dalam mengambil suatu keputusan

bisnis. Secara empiris inflasi yang tidak stabil juga menyebabkan paritas daya beli masyarakat memburuk dan penurunan pada investasi, yang akhir dari permasalahan ini bermuara pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Menurut Kuncoro (2001) bahwa pembangunan manusia secara bersama-sama melihat semua perspektif masalah di masyarakat, bukan hanya pada perspektif sosial saja tapi juga perspektif ekonomi dan manusianya. Sehingga timbulnya peningkatan inflasi di suatu wilayah akan berimplikasi pada penurunan pembangunan manusianya

2.2.3. Hubungan Pengangguran Terhadap *Human Development Index (HDI)*

Berdasarkan pendapat dari Todaro & Smith (2003) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu pencapaian tersendiri bagi suatu wilayah. Pembangunan manusia memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan suatu negara untuk mempelajari teknologi modern, mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan. Mengurangi pengangguran dan mencapai pendapatan yang lebih tinggi akan meningkatkan porsi pengeluaran rumah tangga yang ditujukan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga akan mempengaruhi pembangunan manusia. Tidak hanya itu, peningkatan pada jumlah pengangguran juga akan menjadi penghambat upaya pembangunan manusia, karena dengan meningkatnya pengangguran akan berdampak pada menurunnya pendapatan perkapita masyarakat dan berimplikasi

pada penurunan paritas daya beli masyarakat yang merupakan salah satu indikator pembentuk *Human Development Index* (HDI).

2.2.4. Hubungan Korupsi Terhadap *Human Development Index* (HDI)

Korupsi diibaratkan virus yang menjadi penghambat dari upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya tindak korupsi yang terindikasi di antara sendi birokrasi menjadikan mengganggu kelancaran roda perekonomian. Hal ini diakibatkan oleh terlalu banyaknya jabatan yang diduduki oleh pemangku kepentingan yang memiliki sifat serakah. Sehingga memicu perlambatan pembangunan manusia, yang notabeneanya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat umum. Namun akibat adanya korupsi, upaya tersebut teralihkan oleh pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran pribadi atau individu pelaku korupsi.

2.2.5. Hubungan Tingkat Pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC) Terhadap HDI Yang Dimoderasi Korupsi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Nawatmi (2014) mengenai pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara kawasan ASIA Pasifik, menunjukkan bahwa variabel korupsi yang diwakili oleh *Corruption perception index* (CPI) menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 12 negara di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bersih suatu negara dari tindak korupsi maka menyebabkan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindi Widianingrum, dkk (2018), yang dari penelitiannya dihasilkan

bahwa adanya peningkatan korupsi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwa adanya korupsi akan menurunkan atau mengurangi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia.

2.2.6. Hubungan Inflasi Terhadap HDI Yang Dimoderasi Korupsi

Imbas dari maraknya praktek korupsi adalah biaya yang tinggi yang akan dikeluarkan oleh pengusaha dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Kenaikan biaya ini akan menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar di pasar. Kenaikan harga ini akan sangat sulit diprediksi dan cenderung berpengaruh terhadap kenaikan tingkat inflasi. Sehingga dapat dikatakan adanya peningkatan pada korupsi akan memperkuat pengaruh inflasi terhadap pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindy Widianingrum, dkk (2018), mengenai hubungan korupsi dan inflasi dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi untuk 117 negara, menunjukkan bahwa adanya peningkatan korupsi menyebabkan peningkatan inflasi, dan *Vice versa*.

2.2.7. Hubungan Pengangguran Terhadap HDI Yang Dimoderasi Korupsi

Tindak pidana korupsi juga akan berdampak pada ketimpangan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Adanya korupsi akan memaksa para pelaku usaha untuk mengeluarkan biaya tambahan agar dapat memperlancar kegiatan usahanya. Hal ini akan menjadi penghambat para investor dalam menanamkan modal karena sulitnya mendirikan dan menjalankan usaha diakibatkan oleh adanya birokrasi panjang yang ditimbulkan oleh korupsi. Akhirnya hal ini menyebabkan semakin

kecilnya jumlah lapangan pekerjaan yang alhasil dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Oleh karena itu semakin tingginya tingkat korupsi akan berdampak pada penguatan pengaruh pengangguran terhadap pembangunan manusia.

2.2.8. Hubungan *Economic Freedom* Terhadap *Human Development Index* (HDI)

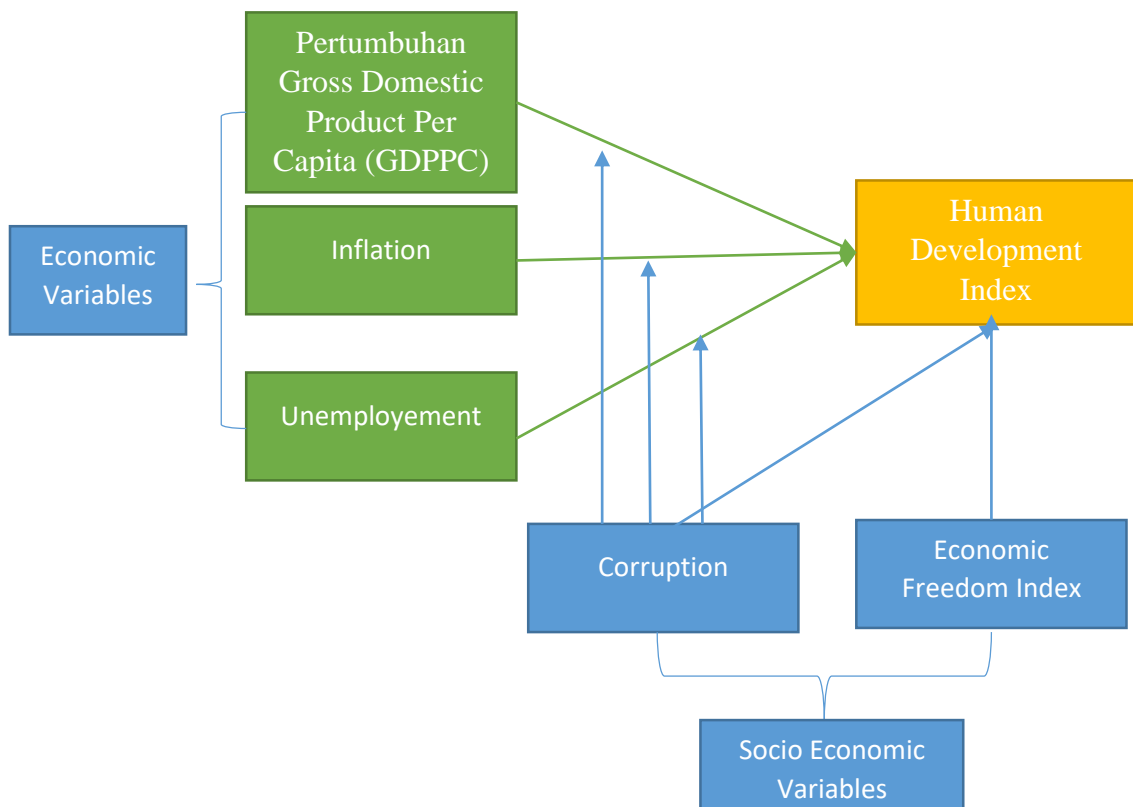
Secara teoritis, *Economic Freedom* merupakan suatu karangan berisi kumpulan prinsip yang kompatibel dengan visi kemakmuran yang terimplementasikan dalam suatu proses ekonomi. Makna dari kebebasan ekonomi ini terkadang disalah artikan hanya sebagai instrumen untuk mengurus kesejahteraan individu dan akan menggerus cita-cita dari kesejahteraan umum. Hal ini didasari oleh adanya prasangka ideologis yang mempertentangkan kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*). Padahal banyak literatur dan bukti empiris yang menunjukkan bahwa adanya hubungan linear antara kebebasan ekonomi dengan meningkatnya kesejahteraan di masyarakat secara umum. Kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya tercermin dari aspek ekonomi saja, melainkan aspek-aspek yang lain yang terangkum dalam *Human Development Index* (HDI) yaitu aspek pendidikan dan kesehatan. Sesuai studi yang telah dilaksanakan oleh Heritage mengenai *Economic Freedom*, menyebutkan bahwa negara dengan indeks kebebasan ekonomi yang tinggi relatif memiliki tingkat *Human Development Index* (HDI) yang lebih tinggi. Oleh karena itu kebebasan ekonomi juga menjadi salah satu prasyarat yang harus terpenuhi oleh negara dalam merealisasikan pembangunan manusia.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu alur yang menggambarkan secara garis besar dari pola pemikiran dari berjalannya suatu penelitian. Menurut pendapat dari Politik (2009) bahwa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran adalah sebuah kerangka berpikir yang dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam rumusan masalah penelitian dan interpretasi dari beberapa konsep teori serta hubungannya dari setiap konsep tersebut.

Adapun dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana relasi dari korupsi, variabel makro dan *economic freedom* terhadap pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan beberapa indikator makro yang dipakai sebagai variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC), inflasi, dan pengangguran. Disamping itu, penelitian ini juga ingin melihat pengaruh dan hubungan dari variabel makro yang dimaksud terhadap *Human Development Index* (HDI) sebagai variabel dependen, apabila dipengaruhi oleh adanya variabel moderasi. Adapun variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah korupsi, dengan menggunakan variabel *Corruption perception index* (CPI). Adanya efek yang ditimbulkan oleh korupsi dalam mempengaruhi hubungan setiap variabel ekonomi makro terhadap *Human Development Index*, apakah dapat memberikan pengaruh atau hubungan baru atau bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itu dalam penelitian ini, variabel korupsi tidak hanya ditempatkan sebagai variabel bebas saja, yang dapat mempengaruhi langsung terhadap HDI sebagai variabel terikat, tetapi juga diposisikan sebagai variabel

moderasi. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menambahkan variabel economic Freedom sebagai variabel kontrol dalam mempengaruhi Human Development Indeks. Penempatan Economic Freedom sebagai variabel kontrol tidak lepas dengan sandaran teori yang dipakai mengenai hubungan antara *Economic freedom index* dengan *Human Development Index* juga penelitian sebelumnya yang menyatakan adanya hubungan dan pengaruh yang signifikan antara kedua variabel ini. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anisha Madan (2002), Boris Nikolaev (2014), dan Mesut Alper Gezer, Ph.D (2020) menyebutkan bahwa adanya korelasi yang tinggi antara *economic freedom* terhadap HDI.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan alur pemikiran yang mendasarinya, maka hipotesis penelitian yang menjadi asumsi dasar dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC) diduga memiliki pengaruh positif terhadap *Human Development Index (HDI)*.
2. Inflasi diduga memiliki pengaruh negatif terhadap *Human Development Index (HDI)*.
3. Pengangguran diduga memiliki pengaruh negatif terhadap *Human Development Index (HDI)*.
4. Korupsi diduga memiliki pengaruh negatif terhadap *Human Development Index (HDI)*.
5. Korupsi diduga mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC) terhadap *Human Development Index (HDI)*.
6. Korupsi diduga mampu memoderasi pengaruh inflasi terhadap *Human Development Index (HDI)*.
7. Korupsi diduga mampu memoderasi pengaruh pengangguran terhadap *Human Development Index (HDI)*.
8. *Economic Freedom* diduga memiliki pengaruh positif terhadap *Human Development Index (HDI)*.

BAB III

METODE PENELITIAN

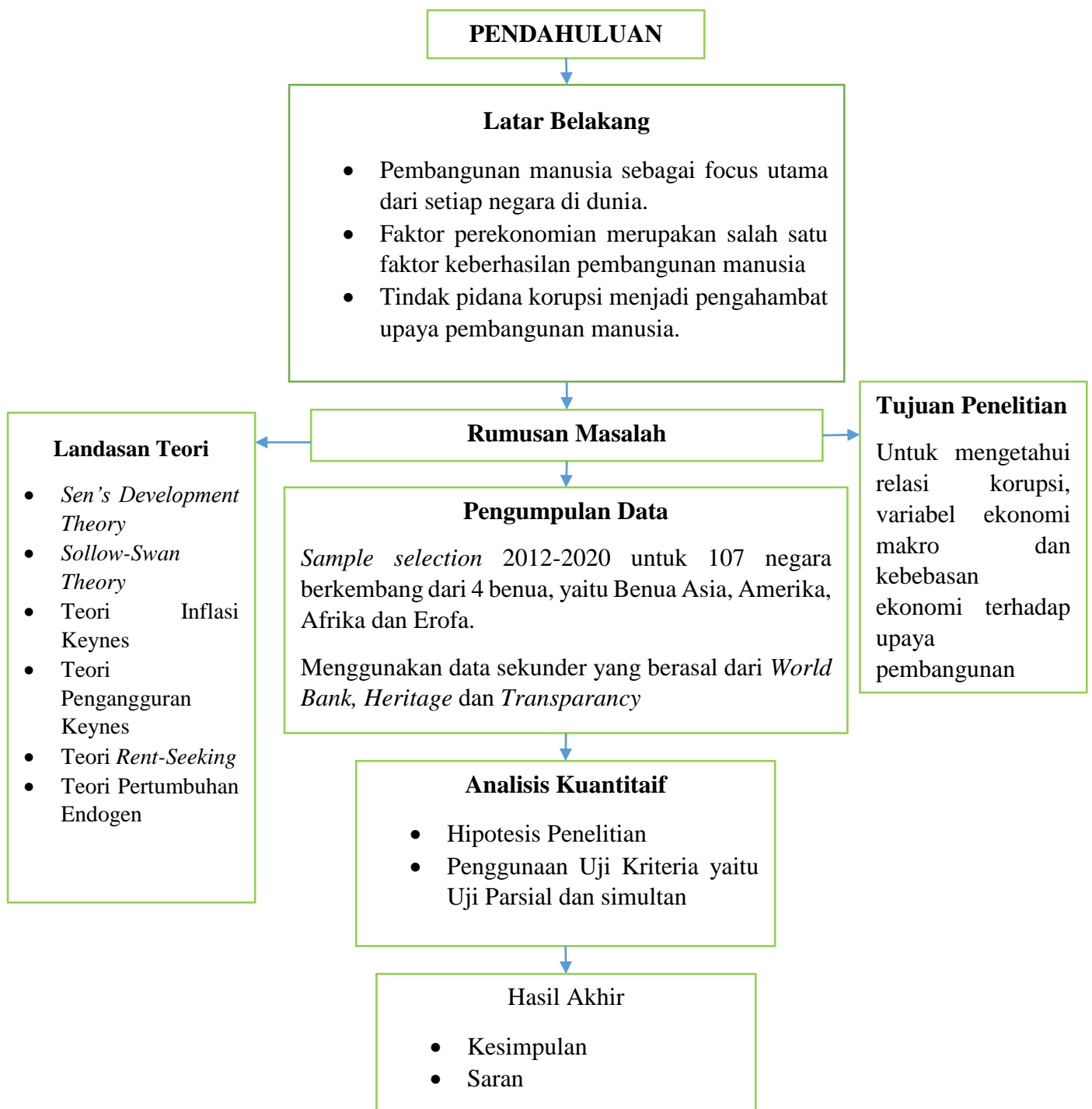
3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data numerik dengan menggunakan instrumen analisis, pengukuran dan pengujian hipotesis berdasarkan perhitungan matematis. Metode penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Adapun proses penelitian dan analisis menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengembang penelitian kuantitatif memahami bahwa peneliti dapat secara sadar mengubah dunia di sekitar mereka dengan melakukan eksperimen. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2015) mengenai metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism dan digunakan sebagai alat untuk meneliti populasi atau suatu sampel, dengan dianalisis dengan cara kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain berpendapat mengenai metode kuantitatif, Sugiyono (2015) juga berpendapat mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau

mengkorelasikannya dengan variabel lain. Maka berdasarkan literatur yang telah disebutkan, bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan suatu sampel data yang dianalisis sesuai dengan kaidah metode matematis dan instrument statistik yang digunakan. Adapun tujuan penelitian ini cenderung lebih ke arah menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, membuat prediksi, dan menggeneralisasi. Teori yang diusulkan berfungsi sebagai kriteria untuk menilai apakah suatu fenomena itu sesuai, dan di sinilah istilah kebenaran etis masuk, kebenaran berdasarkan teori yang dikemukakan oleh seorang peneliti.

3.2. Desain Penelitian

Rancangan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif harus terstruktur, terstandarisasi, formal, dan dirancang secermat mungkin sebelumnya. Oleh karena itu peneliti merancang desain penelitian ini agar penelitian yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan terstruktur. Desain penelitian ini juga menjadi patokan dasar penulis dalam melaksanakan setiap prosedur dan langkah rencana yang akan ditempuh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun desain penelitian yang dimaksud adalah berikut :



Gambar 3.1. Tahapan Penelitian

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data panel yang berasal dari *United Nations Development Programme (UNDP)*, *World Bank*, *Transparency*, dan *Heritage*, dengan data *cross section* berjumlah 60 negara berkembang dari 4 benua, yaitu 18 negara berkembang dari Benua Asia, 15 negara berkembang dari Benua Amerika, 16 negara berkembang dari Benua Afrika dan 11 negara berkembang dari Benua Eropa. Sedangkan interval tahun untuk data *time series* menggunakan interval tahun 2016 hingga tahun 2020. Adapun rekapitulasi data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sumber Data

Nama Variabel	Sumber
<i>Human Development Index (HDI)</i>	<i>United Nation Development Programme (UNDP)</i>
<i>Pertumbuhan Gross Domestic Product Percapita (GDPPC)</i>	<i>World Bank</i>
<i>Inflation</i>	
<i>Unemployment</i>	
<i>Corruption perception index (CPI)</i>	<i>Transparensy</i>
<i>Economic freedom index (EFI)</i>	<i>Heritage</i>

Tabel 3.2. Rekapitulasi Data *Cross Section*

Nama Benua	Negara Berkembang	Jumlah
Benua Asia	Bahrain, Bhangladesh, China, India, Indonesia, Kamboja, Kaakhstathan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Philipina, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Vietnam.	18 negara berkembang
Benua Amerika	Bahamas, Bolivia, Brazil, Chille, Costarica, Ecuador, Elsalvador, Guatemala, Haiti, Jamaika, Mexico, Nikaragua, Paraguay, Trinidad & Tobago, Uruguay.	15 negara berkembang
Benua Afrika	Afrika Tengah, Burkina Faso, Chad, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Maroko, Mesir, Mozambik, Tanzania, Tunisia, Zambia, Zimbabwe, Senegal, Mauritania.	16 negara berkembang
Benua Eropa	Albania, Bosnia & Hergegovina, Bulgaria, Georgia, Hungaria, Croasia, Montenegro, Polandia, Romania, Rusia, Serbia.	11 negara berkembang
Jumlah		60 negara berkembang

Data panel adalah suatu jenis data yang berasal dari gabungan data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* adalah data yang yang dikumpulkan dari satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data *time series* merupakan data

yang terdiri dari kumpulan waktu terhadap satu individu. Jika didasarkan secara teknis, penggunaan data panel dalam suatu penelitian dapat memberikan dua keuntungan, yaitu dapat memberikan data yang lebih banyak sehingga dapat mengurangi kemungkinan efek kolinieritas serta mengurangi derajat kebebasan, sehingga hal ini menunjukkan penggunaan data panel dalam penelitian dapat meningkatkan kualitas efisiensi. Selain itu penggunaan data panel dalam penelitian juga dapat mengurangi permasalahan identifikasi. Selain dari keuntungan yang telah dijabarkan, alasan lain penggunaan data panel dalam penelitian ini adalah karena data panel disinyalir lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengukur efek dari suatu variabel.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional variabel merupakan suatu cara untuk menerjemahkan konsep variabel ke dalam alat pengukuran. Setelah diterjemahkan, maka variabel penelitian haruslah dapat diukur berdasarkan kaidah pengukuran beserta pengujianya, di antaranya adalah uji validitas dan reliabilitas tiap indikator dan sistem yang telah disusun.

Penelitian ini menggunakan 4 jenis variabel penelitian yaitu:

1. Variabel Dependent

Adapun variabel dependen yang digunakan adalah:

a. *Human Development Index (HDI)*

United Nations Development Programme (UNDP) telah membuat suatu indeks pengukuran yang menjadi patokan dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah yaitu *Human Development Indeks (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks tersebut mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia dari tiga elemen, yaitu kesehatan, pendidikan dan kelayakan hidup.

Elemen kesehatan yang menjadi salah satu tolak ukur HDI itu sendiri dilihat dari aspek angka harapan hidup masyarakat. Terdapat asumsi yang mendasari hal ini yaitu bahwa secara logika, kesehatan memiliki hubungan kausalitas dengan panjangnya harapan hidup. Semakin sehat suatu individu maka dipastikan bahwa yang bersangkutan memiliki interval harapan hidup yang panjang. Walaupun secara *de facto* maupun *de jure* hal itu tidak bisa ditentukan dengan faktor kesehatan, karena bersinggungan secara langsung dengan hak prerogatif Sang Pencipta.

Disamping kesehatan, faktor pendidikan juga menjadi salah satu elemen yang membentuk HDI. Sesuai dengan literatur yang banyak menjelaskan mengenai pembangunan manusia, bahwa yang dimaksud pembangunan disini adalah bukan hanya mengenai cara peningkatan kemampuan dari manusia saja, tapi juga dalam pemanfaatan secara maksimal dari segala kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, pantas apabila pendidikan menjadi salah satu elemen yang membentuk HDI, karena pendidikan menjadi hal yang mendasar dari kualitas manusia. Pendidikan menjadi aspek pendorong dan pembangun dari segala hal.

Tidak terbayang apabila masyarakat di suatu wilayah memiliki tingkat pendidikan yang kurang mapan. Maka dapat dipastikan awal mula kehancuran peradaban manusia sedang dimulai. Dalam mengukur aspek pendidikan ini, UNDP melihat dari faktor rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.

Elemen terakhir pembentuk HDI adalah kelayakan hidup. Aspek ini diukur dari paritas daya beli masyarakat. Elemen ini menjadi pembeda teori *Human Development Index (HDI)* yang dikeluarkan oleh UNDP dengan teori *Physical Quality of Life Index (PQLI)* yang dikembangkan oleh Morris pada tahun 1971, Teori PQLI ini tidak memasukan aspek ekonomi dalam perhitungannya, sehingga masih terdapat kekurangan dari teori ini, karena belum sempurna menggambarkan aspek pembangunan manusia.

Adapun prosedur perhitungan HDI adalah dengan mencari rata-rata dari ketiga elemen tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus:

$$HDI = \frac{x1 + x2 + x3}{3}$$

Keterangan:

X1 = Elemen Kesehatan (Angka harapan hidup)

X2 = Elemen Pendidikan (Angka melek huruf + rata-rata sekolah)

X3 = Elemen Kelayakan Hidup (Paritas daya beli masyarakat)

Tabel 3.3. Elemen Pembentuk HDI

Elemen	Indikator Perhitungan	Maksimum	Minimum	Keterangan
Elemen Kesehatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Elemen Pendidikan	Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
	Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
Elemen Kelayakan Hidup	Paritas Daya Beli	732.720	300.000	Standar UNDP menggunakan penyesuaian GDP Riil

Dalam menetapkan peringkat HDI itu sendiri, UNDP membagi kedalam 4 kategori dengan interval 0,0 sampai 100 yaitu :

- a) Sangat tinggi : $HDI > 80,0$
- b) Tinggi : $66,0 - 79,9$
- c) Sedang = $50,0 - 65,9$
- d) Rendah = $HDI < 50,0$

2. Variabel Independent

a. Pertumbuhan *Gross Domestic Product Percapita* (GDPPC)

Gross Domestic Product Per Capita (GDPPC) atau bisa juga disebut sebagai pendapatan rata-rata dari penduduk suatu wilayah. Secara umum GDPPC juga digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan perkapita yang diperoleh di suatu negara maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut memiliki kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Gross Domestic Product Per Capita (GDPPC) juga menjadi tolak ukur acuan dalam menghitung pertumbuhan riil ekonomi perkapita di suatu wilayah atau negara. Adapun cara menghitung *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC) adalah dengan membagi antara penerimaan *Gross Domestic Product* (GDP) menurut harga konstan atau GDP riil di suatu negara dengan jumlah penduduknya, yaitu dengan menggunakan rumus berikut :

$$GDPPC = \frac{GDP \text{ riil}}{Population}$$

Keterangan :

GDPPC = *Gross Domestic Product Per Capita*

GDP riil = Jumlah GDP riil

Population = Jumlah Penduduk

Sedangkan rumus untuk mencari pertumbuhan dari *Gross Domestic Product Per Capita* (GDPPC) adalah dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan GDPPC} = \frac{GDPPC_t - GDPPC_{t-1}}{GDPPC_t} \times 100\%$$

Keterangan:

$GDPPC_t$ = Jumlah GDPPC tahun sekarang

$GDPPC_{t-1}$ = Jumlah GDPPC tahun lalu

b. Inflation

Inflasi adalah suatu fenomena yang terjadi saat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Bila kenaikan harga hanya berdampak pada beberapa barang saja, maka hal itu belum bisa dikatakan inflasi. Fenomena ini menjadi suatu permasalahan klasik di setiap negara yang akan mengakibatkan perlambatan pada penurunan pendapatan riil masyarakat, yang secara lebih lanjut akan menyebabkan *multiplier effect* pada perekonomian makro. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno (2008, 27) dalam buku *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* menyebutkan bahwa inflasi adalah inflasi adalah suatu fenomena yang terjadi akibat adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Secara umum inflasi dapat dihitung dengan menggunakan dua perspektif cara, yaitu dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), atau dengan

menggunakan GDP deflator. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks harga yang menggambarkan suatu keadaan harga rata-rata barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Sedangkan GDP deflator adalah hasil dari rasio antara GDP nominal dengan GDP riil. Fungsi dari GDP Deflator adalah sebagai pedoman dalam melihat tingkat fluktuatif harga secara umum. GDP Deflator itu sendiri dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$GDP\ Deflator = \frac{GDP\ Nominal}{GDP\ Riil} \times 100$$

Adapun cara mengukur tingkat inflasi, baik dengan menggunakan IHK atau GDP Deflator adalah dengan menggunakan rumus berikut :

$$Inf = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

$$Inf = \frac{GDP_t - GDP_{t-1}}{GDP_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Inf = Inflasi

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun sekarang

IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

GDP_t = GDP Deflator tahun sekarang

GDP_{t-1} = GDP Deflator tahun sebelumnya

Tingkat dari inflasi jug dapat digolongkan berdasarkan beberapa lingkup kategori diantaranya:

a. Berdasarkan laju inflasi:

- 1) Inflasi ringan (tingkat inflasi antara 7-10%) adalah inflasi yang ditandai dengan harga meningkat secara perlahan.
- 2) Inflasi Pentium adalah inflasi tinggi dengan tingkat inflasi antara 20-100%, yang menghasilkan sangat mengganggu perekonomian dan distorsi besar dalam perekonomian.
- 3) Hiperinflasi, tingkat inflasi yang tinggi dengan tingkat inflasi sangat tinggi (lebih dari 100%). Inflasi ini sangat mematikan kegiatan ekonomi masyarakat.

b. Menurut sumber atau penyebab inflasi

- 1) Inflasi penuh, yang biasanya terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli yang sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi jumlah total produk yang tersedia. Permintaan agregat tumbuh lebih cepat daripada potensi produktif ekonomi, menyebabkan inflasi.
- 2) *Cost-push Inflation*, yang terjadi ketika biaya produksi terus meningkat. Kenaikan biaya produksi dapat timbul dari kenaikan harga input, seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan biaya listrik, kenaikan harga BBM, dan kenaikan input lainnya.
- 3) Inflasi impor yaitu Inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang-barang impor, terutama yang berperan penting dalam setiap kegiatan produksi.

c. Menurut sumber inflasi

- 1) Inflasi dalam negeri, yaitu inflasi yang terjadi didalam negeri. Misalnya, permintaan akan barang-barang tertentu meningkat dan kemudian terjadi inflasi permintaan secara umum di dalam negeri. Atau jika harga faktor produksi yang diimpor naik, akan terjadi inflasi dorongan biaya dari sumber luar negeri atau inflasi dorongan biaya input.
- 2) Inflasi import, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Misalnya, permintaan ekspor terus meningkat, sehingga terjadi inflasi permintaan secara keseluruhan di luar negeri. Atau jika harga faktor-faktor produksi yang diimpor naik, maka terjadi inflasi desakan biaya yang berasal dari luar negeri atau inflasi desakan biaya impor.

c. *Unemployment*

Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang secara langsung mempengaruhi manusia, dan juga merupakan masalah yang paling serius. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup dan tekanan psikologis. Jadi tidak mengherankan jika pengangguran sering menjadi topik perdebatan politik dan politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah dapat digunakan dengan menggunakan beberapa instrumen pendekatan, yaitu :

a. Labour Force Approach

Pendekatan ini didasarkan dengan persentase dari perbandingan jumlah penduduk yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja.

b. Labour Utilization Approach

Pendekatan ini membagi tenaga kerja menjadi dua golongan yaitu :

- 1) Employed adalah orang yang bekerja penuh dengan jam kerjanya mencapai 35 jam/minggu
- 2) Setengah menganggur adalah mereka yang bekerja dengan waktu kerjanya kurang dari 35 jam/minggu atau dengan kata lain belum dimanfaatkan secara penuh.

Pengangguran yang terjadi dalam suatu perekonomian dapat berdampak negatif atau mempengaruhi perekonomian maupun individu dan masyarakat. Salah satu efek negatif dari pengangguran terhadap perekonomian adalah bahwa hal itu mencegah masyarakat memaksimalkan kesejahteraannya. Pada saat yang sama, salah satu dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat adalah pengangguran. Dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan mata pencaharian. Menurut Nangga dari Fungu Sitio, "Di negara berkembang, tidak ada asuransi pengangguran, sehingga para penganggur harus hidup dari simpanan atau pinjaman/bantuan masa lalu dari keluarga dan teman.

3. Variabel Moderasi

Adapun variabel yang digunakan sebagai variabel moderasi untuk mewakili tingkat korupsi pada penelitian ini adalah:

a. Corruption perception index (CPI)

Corruption perception index (CPI) adalah sebuah indeks yang dirancang untuk mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap tingkat korupsi di sektor publik. Fokus utama CPI adalah pada korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintah, melibatkan pegawai negeri, penyelenggara negara, dan politisi.

Indeks CPI ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 oleh Transparency International (TI), sebuah organisasi nirlaba global yang berfokus pada pemberantasan korupsi. CPI menggunakan data dan survei yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang mencakup persepsi korupsi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor publik.

Metodologi CPI melibatkan penilaian dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang independen dan terpercaya, termasuk lembaga survei, institusi akademik, dan analisis risiko korupsi. Data tersebut mencerminkan persepsi dan penilaian subjektif para ahli, pengusaha, dan masyarakat terkait tingkat korupsi di negara-negara tertentu.

Skala CPI berkisar dari 0 hingga 100, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi dan 100 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah. Negara-negara yang mendapatkan skor lebih tinggi dalam CPI dianggap memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dan dianggap lebih transparan dan akuntabel dalam tata kelola pemerintahan.

Adapun indeks pembentuk dari *Corruption perception index* (CPI) yang digunakan oleh *Transparency* adalah sebagai berikut:

- a. *World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI)*: WGI adalah salah satu sumber data yang digunakan untuk mengukur korupsi dalam CPI. WGI mencakup beberapa indikator, termasuk kontrol korupsi, hukum dan ketertiban, efektivitas pemerintahan, dan akuntabilitas.
- b. *Global Insight Country Risk Ratings*: Global Insight menyediakan penilaian risiko negara yang mencakup faktor-faktor seperti korupsi, stabilitas politik, keamanan hukum, dan transparansi pemerintahan. Penilaian ini menjadi salah satu sumber data dalam CPI.
- c. *Bertelsmann Foundation Transformation Index (BTI)*: BTI adalah indeks yang mengukur transformasi politik dan ekonomi di negara-negara berkembang. Salah satu komponennya adalah penilaian terhadap korupsi. Data dari BTI juga digunakan dalam perhitungan CPI.
- d. *Economist Intelligence Unit (EIU) Country Risk Ratings*: EIU menyediakan penilaian risiko negara yang mencakup indikator-indikator seperti korupsi, ketegangan politik, stabilitas sosial, dan kebijakan ekonomi. Penilaian ini juga menjadi salah satu faktor dalam perhitungan CPI.
- e. *Freedom House Nations in Transit*: *Freedom House* menyediakan indeks yang mengukur demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia di negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah. Komponen tentang korupsi dalam indeks ini juga digunakan dalam CPI.

4. Variabel Kontrol

Penelitian ini juga menggunakan variabel control sebagai variabel penelitiannya. Adapun variabel control yang digunakan adalah:

a. Economic freedom index (EFI)

Economic Freedom Index (EFI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kebebasan ekonomi di suatu negara. Indeks ini menggabungkan sejumlah faktor yang mencakup aspek hukum, ukuran pemerintah, efisiensi regulasi, dan kebebasan pasar. Indeks ini disusun atas empat elemen penting yaitu

1. ***Rule of Law (Hukum dan Keadilan)***: Meliputi hak kepemilikan yang terjamin, integritas pemerintah dalam menjalankan tugasnya, dan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan hukum.
2. ***Government Size (Ukuran Pemerintah)***: Termasuk pengeluaran pemerintah, beban pajak yang diterapkan, dan kondisi keuangan pemerintah yang mencerminkan kesehatan fiskal.
3. ***Regulatory Efficiency (Efisiensi Regulasi)***: Meliputi kebebasan berbisnis yang mencakup kemudahan dalam menjalankan usaha, kebebasan tenaga kerja yang mencerminkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan kebebasan moneter yang terkait dengan stabilitas mata uang.
4. ***Open Markets (Pasar Terbuka)***: Termasuk kebebasan perdagangan yang meliputi kebijakan tarif dan hambatan perdagangan, kebebasan investasi yang mencakup regulasi investasi dan perlindungan investor,

serta kebebasan finansial yang terkait dengan akses ke sistem keuangan dan regulasi perbankan.

Adapun metode yang digunakan oleh *Heritage* untuk mengukur *Economic freedom index* adalah dengan menggunakan pendekatan indeks komposit.

Tabel 3.4. Definisi Operasional Variabel

No	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Variabel	Satuan
1.	Variabel <i>Dependent</i>	<i>Human Development Index (HDI)</i>	HDI merupakan indeks yang dikembangkan oleh UNDP sebagai indikator keberhasilan suatu wilayah dalam upaya pembangunan manusia.	Indeks
2.	Variabel Independent	Pertumbuhan <i>Gross Domestic Product Per Capita (GDPPC)</i>	Pertumbuhan <i>Gross Domestic Product Per Capita</i> adalah nilai dari pembagian jumlah GDPPC untuk tahun sekarang dibagi dengan jumlah GDPPC tahun lalu dan dikali dengan 100%	(%) Per Tahun

		Inflation	Inflasi yang diukur dengan tingkat pertumbuhan tahunan deflator implisit PDB menunjukkan tingkat perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. Deflator implisit PDB adalah rasio PDB dalam mata uang lokal saat ini terhadap PDB dalam mata uang lokal konstan.	(%) Per Tahun
		Unemployment	Pengangguran mengacu pada bagian angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi tersedia untuk dan mencari pekerjaan. Data yang digunakan adalah persentase tingkat pengangguran dari total angkatan kerja	% dari total angkatan kerja

3	Variabel Moderasi	<i>Corruption perception index (CPI)</i>	CPI merupakan indeks komposit yang menunjukkan tingkat korupsi di suatu negara. CPI digunakan sebagai variabel moderasi karena adanya asumsi bahwa variabel korupsi akan mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel indikator ekonomi makro terhadap HDI	Indeks
4	Variabel Kontrol	<i>Economic freedom index</i>	<i>Economic freedom index</i> merupakan indeks yang mengukur kebebasan ekonomi berdasarkan 12 faktor kuantitatif dan kualitatif di setiap negara.	Indeks

3.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan instrument peeltian data panel dengan melibatkan variabel moderasi sebagai variabel yang mempengaruhi pengaruh hubungan variabel independen terhadap dependen. Berdasarkan banyak literatur toeri yang menjelaskan alur prosedur penelitian dengan menggunakan konsep data panel, sebelum dilakukannya pengujian terhadap model regresi, sebelumnya harus dilakukan tahapan pemilihan model yang tepat untuk ditetapkan menjadi model penelitian. Berdasarkan pendapat dari Ghozali et al, (2013:3251) bahwa terdapat tiga pendekatan model yang sering kali dijumpai dalam sautu peneltian dengan menggunakan data panel, antara lain :

1. *Common effect Model* (CEM)

Common effect Model (CEM) adalah sebuah model paling sederhana dari data panel yang mencoba untuk mengestimasi parameter model dengan menggabungkan data dari time series dan cross section tanpa mempertimbangkan perbedaan waktu dan entitas. Akibat dari tidak mempertimbangkan kedua aspek tersebut, maka terdapat asumsi yang menyertai model ini yaitu bahwa data antar entitas sama pada berbagai kurun waktu .Sebagai isntrumen teknisnyanya model ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square*.

2. *Fixed effects Model* (FEM)

Fixed effect Model (FEM) memiliki asumsi pada pengestimasian modelnya yaitu adanya perbedaan efek antar entitas. Perbedaan tersebut diakomondasikan dengan adanya perbedaan pada interceptnya, namun setiap intersep itu memiliki

sifat yang konstan. Menurut pendapat dari Ghozal et al, (2013:261) terdapat keunggulan dengan penggunaan model ini dalam suatu penelitian yaitu dapat membedakan efek antara entitas dan waktu, juga karena model ini tidak perlu menggunakan asumsi bahwa komponen error tidak memiliki korelasi dengan variabel independen.

3. *Random effect Model (REM)*

Random effect Model (REM) merupakan model yang mengasumsikan bahwa error terms pada model data panel selalu ada memiliki hubungan antar waktu maupun entitas. Adapun pendekatan yang dipakai dalam pengestimasiannya model ini adalah dengan metode *generalized least square (GLS)*. Menurut Gurajati dan Porter (2012:602) penggunaan model ini sangat cocok untuk data panel yang memiliki jumlah data *cross section* yang lebih besar dari pada jumlah *time series* nya.

3.5.1. Model Persamaan Regresi

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi linear berganda data panel, yaitu model persamaan yang dibuat untuk mencari tahu relasi antara variabel variabel independen dengan variabel dependen yang telah ditentukan dalam penelitian alasan penggunaan model regresi ini adalah karena penggunaan model regresi dinilai yang paling cocok untuk dijadikan instrument penganalisaan relasi masing-masing variabel independen terhadap dependen. Adapun dalam penelitian ini, model regresi yang disusun adalah sebagai berikut:

$$HDI_{it} = f(GDPPC_{it}, INF_{it}, UEM_{it}, CPI_{it}, EFI_{it})$$

Keterangan :

i = Data *Cross Section*

t = Data *Time Series*

HDI = *Human Developmet Indeks*

GDPPC = *Pertumbuhan Gross Domestic Product Per Capita*

INF = *Inflation*

UEM = *Unemployment*

CPI = *Corruption perception index*

EFI = *Economic freedom index*

Dari persamaan umum yang telah disusun tersebut, maka dikembangkan pula model persamaan regresi yang menjadi instrument model yang digunakan dalam penelitian ini :

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 GDPPC_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 UEM_{it} + \beta_4 CPI_{it} + \beta_5 EFI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

i = Data *Cross Section*

t = Data *Time Series*

β_0 = Intercept

Variabel Dependent :

HDI = *Human Developmet Indeks*

Variabel Independent :

GDPPC = *Pertumbuhan Gross Domestic Product Per Capita*

INF = *Inflation*

UEM = *Unemployment*

CPI = *Corruption perception index*

Variabel Kontrol :

EFI = *Economic freedom index*

ε = *Disturbance Error*

3.5.2. Model Regresi Moderasi

Metode yang digunakan pada penelitian ini dalam menganalisis pengaruh variabel moderasi adalah dengan menggunakan model regresi moderasi. Model ini merupakan suatu model regresi yang didalamnya melibatkan variabel moderasi yang membangun model tersebut. Variabel moderasi itu sendiri berperan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlambat hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Namun apabila pada suatu penelitian, tidak memasukan variabel moderasi dan hanya melibatkan variabel independen dan dependen saja, maka model yang digunakan hanya model regresi saja. Adapun persamaan ekonometrika model regresi moderasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Persamaan Model Regresi Moderasi dari Hubungan Pertumbuhan GDPPC terhadap HDI

$$HDI_{it} = f(GDPPC_{it}, CPI_{it}, GDC_{it})$$

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 GDPPC_{it} + \beta_2 CPI_{it} + \beta_3 GDC_{it}$$

- b. Persamaan Model Regresi Moderasi dari Hubungan INF terhadap HDI

$$HDI_{it} = f(INF_{it}, CPI_{it}, INC_{it})$$

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 CPI_{it} + \beta_3 INC_{it}$$

- c. Persamaan Model Regresi Moderasi dari Hubungan UEM terhadap HDI

$$HDI_{it} = f(UEM_{it}, CPI_{it}, UEC_{it})$$

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 UEM_{it} + \beta_4 CPI_{it} + \beta_5 UEC_{it}$$

Keterangan :

i = Data Cross Section

t = Data Time Series

β_0 = Intercept

Variabel Dependent :

HDI = Human Development Indeks

Variabel Independent :

GDPPC = Pertumbuhan *Gross Domestic Product Per Capita*

INF = *Inflation*

UEM = *Unemployment*

Variabel Moderasi :

CPI = *Corruption perception index*

Variabel Interaksi :

GDC = GDPPC x CPI

INC = INF x CPI

UEC = UEM x CPI

3.6. Metode Pengujian

3.6.1. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari setiap jenis model pada model regresi dengan menggunakan data panel, terdapat beberapa prosedur pengujian untuk pemilihan model yang tepat sebagai instrumen penelitian. Adapun pengujian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji Chow (1-F Test)

Uji chow adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk memilih model yang cocok dengan membandingkan model Common Effect Model dengan *Fixed effect Model*. Dasar yang menjadi pijakan pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah :

- a. Jika nilai probabilitas untuk cross section F lebih besar dari nilai α yang telah ditentukan yaitu 5%, maka terima H_0 , yaitu dengan memilih model *Common effect Model* (CEM), sebagai model yang tepat untuk dipakai dalam penelitian
- b. Jika nilai probabilitas untuk cross section F lebih kecil dari nilai α yang telah ditentukan yaitu 5%, maka terima H_1 , yaitu dengan memilih model *Fixed effect Model* (FEM), sebagai model yang tepat untuk dipakai dalam penelitian

Adapun hipotesis yang mendasari pengujian ini adalah

H_0 : *Common effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed effect Model* (FEM)

Jika dalam pengujian ini yang model yang didapat adalah model *Common effect Model* (CEM), maka pengujian selanjutnya adalah dengan menggunakan pengujian Lagrange Multiplier untuk membandingkan model *Common effect Model* dengan *Random effect Model* (REM). Sedangkan apabila hasil yang didapat pada Uji Chow adalah dengan memilih *Fixed effect Model* (FEM) maka pengujian selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan uji hausman, yaitu pengujian untuk membandingkan *Fixed effect Model* (FEM) dengan *Random effect Model* (REM).

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan sebagai instrument pengujian untuk memilih model dari data panel dengan membandingkan antara model *Fixed Model Effect* (FEM) dengan *Random effect Model* (REM). Dalam prosedur pengujiaannya, uji Hausman memiliki dasar pijakan pengambilan keputusan yaitu :

- a. Jika nilai probabilitas untuk cross section F lebih besar dari nilai α yang telah ditentukan yaitu 5%, maka terima H_0 , yaitu dengan memilih model *Random effect Model* (REM), sebagai model yang tepat untuk dipakai dalam penelitian
- b. Jika nilai probabilitas untuk cross section F lebih kecil dari nilai α yang telah ditentukan yaitu 5%, maka terima H_1 , yaitu dengan memilih model *Fixed effect Model* (FEM), sebagai model yang tepat untuk dipakai dalam penelitian

Adapun hipotesis yang mendasari pengujian ini adalah

H_0 : *Random effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed effect Model* (FEM)

Selanjutnya setelah ditetapkan hasil dari pengujian ini, maka dilanjutkan pengujian berikutnya apabila pada Uji Hausman didapatkan model *Random effect Model* (REM). Namun apabila pada pengujian ini, model yang didapat adalah *Fixed effect Model* (FEM) maka pengujian untuk memilih model telah selesai, karena model FEM telah terpilih sebanyak dua kali dari dua pengujian untuk memilih model .

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange adalah metode pemilihan antara *Common effect Model* (CEM) dan *Random effect Model* (REM) yang digunakan untuk mengestimasi data panel. *Random effect Model* (REM) dikembangkan oleh Breusch-Pagan, metode ini digunakan untuk mengevaluasi signifikansi berdasarkan nilai residual dari metode OLS. Dalam menentukan keputusannya, Uji Lagrange Multiplier memiliki sedikit perbedaan dengan kedua pengujian sebelumnya, yaitu menggunakan perbandingan cross section Breusch- Pagan dengan nilai α . Sehingga dasar ketentuan dari pengujian ini adalah :

- a. Jika nilai *cross section Breusch- Pagan* lebih besar dari nilai α yang telah ditentukan yaitu 5%, maka terima H_0 , yaitu dengan memilih model *Common effect Model* (CEM), sebagai model yang tepat untuk dipakai dalam penelitian

- b. Jika nilai *cross section Breusch-pagan* lebih kecil dari nilai α yang telah ditentukan yaitu 5%, maka terima H_1 , yaitu dengan memilih model *Random effect Model* (REM), sebagai model yang tepat untuk dipakai dalam penelitian

Adapun hipotesis yang mendasari pengujian ini adalah

H_0 : *Common effect Model* (CEM)

H_1 : *Random effect Model* (REM)

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa model yang dipakai dalam penelitian tidak bias, valid, efisien dan memenuhi prasyarat asumsi dasar untuk dilakukannya regresi dengan menggunakan data panel. Secara teori, uji asumsi klasik yang biasa digunakan sebagai prasyarat penggunaan instrument regresi linier berganda dengan menggunakan data panel itu sendiri, terdiri dari 3 jenis pengujian yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji dan uji multikolinieritas. Namun dari ketiga pengujian ini, tidak semua pengujian harus dilakukan untuk setiap model regresi data panel yang digunakan. Terdapat beberapa pengujian yang wajib dilakukan pada suatu model dan tidak pada model lain, begitupun sebaliknya. Adapun matriks pengujian untuk setiap model regresi data panel yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Matriks Penggunaan Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	OLS (FEM &CEM)	GLS (REM)
Normalitas	Tidak	Ya
Heteroskedastisitas	Ya	Tidak
Multikolinieritas	Ya, Jika variabel bebas lebih dari satu	Ya, Jika variabel bebas lebih dari satu
Autokorelasi	Tidak	Tidak

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji setiap variabel dalam model regresi memiliki distribusi data yang normal atau tidak, yaitu distribusi data dengan bell shaped. Menurut Gozali (2013) yang dimaksud data yang baik adalah data yang memiliki pola seperti distribus normal, yaitu dta yang tidak dominan ke kiri atau sebaliknya.

Analisis grafis merupakan cara paling mudah untuk dapat melihat efek normalitas yang dihasilkan oleh tiap variabel. Cara ini dilakukan dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi normal probability plot. Normal probability plot adalah perbandingan distribusi kumulatif data yang sebenarnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Adapun dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah, jika data terlihat menyebar

disekitar garis diagonal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dan model memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan menganalisis grafis, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan berbagai cara lainnya, seperti metode Kolmogorov smirnov, skewness kurtosis, jarque bera, dan masih banyak lagi. Adapun dalam penelitian ini akan dilakukan uji normalitas dengan menggunakan metode jarque bera, yaitu metode yang membandingkan antara probability dari nilai jarque –bera dengan nilai α (nilai signifikansi) sebesar 5 %. Sehingga hipotesis yang didasarkan untuk pengujian ini adalah :

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Jika nilai probability dari jarque- bera lebih besar dari 5% maka terima H_0 , namun apabila sebaliknya maka tolak H_0 , dan terima H_1 .

3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian untuk menguji sebuah model regresi dari residual dua observasi ke observasi lain. Menurut Imam Ghazali (2016), menyebutkan bahwa model regresi yang baik adalah model yang tidak terindikasi heteroskedastisitas didalamnya. Adapun cara melakukan pengujian ini adalah dengan melihat grafik scatterplot atau dengan cara melihat nilai prediksi untuk variabel dependen dengan residual error. Selain dengan dua metode tersebut, salah satu metode lain yang sering digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan pendekatan metode uji Breusch Pagan Godfrey, yaitu suatu pendekatan metode dengan membandingkan nilai probability chi square (2)

pada Obs*R-Squared dengan nilai α sebesar 5%. Adapun dalam penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan pendekatan metode uji Breusch Pagan Godfre. Sehingga hipotesis yang mendasari pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah :

H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas

H_1 : Ada heteroskedastisitas

Jika nilai p-value lebih besar dari 5% maka terima H_0 , namun apabila sebaliknya maka tolak H_0 , dan terima H_1 .

3.6.2.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merujuk pada hubungan antara observasi dalam deret waktu dalam sebuah model regresi, atau dengan kata lain, kesalahan (error) dari satu observasi dipengaruhi oleh kesalahan observasi sebelumnya. Ketika autokorelasi terjadi dalam model regresi, koefisien regresi yang dihasilkan tidak konsisten, artinya tingkat ketidaktepatan (error) menjadi sangat tinggi dan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Uji Breush-Godfrey sering digunakan untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi dalam model regresi. Beberapa penyebab autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model penggunaan log pada model, ketidaktepatan dalam memasukkan variabel yang relevan, dan autokorelasi itu sendiri mengakibatkan bias dalam estimasi parameter dan varian yang tidak minimal, sehingga tidak efisien (Bayu Setyoko, 2013). Masalah autokorelasi dalam model dapat menunjukkan adanya hubungan antara gangguan (error term) variabel dalam suatu model. *Breush-Godfrey* digunakan untuk menentukan apakah ada

autokorelasi atau tidak dalam model regresi tersebut. Adapun kriterian pengujian autokorelasi dengan menggunakan metode *Breush-Godfrey* adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terindikasi autokorelasi

H_1 : Terindikasi autokorelasi

Jika nilai p-value > 0.05 maka terima H_0 dan tolak H_1 dan jika nilai p-value < 0.05 maka mengambil keutusan sebaliknya.

3.6.2.4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah instrument pengujian yang dilakukan untuk melihat adanya korelasi antar variabel independen. Efek dari adanya indikasi multikolinieritas pada suatu model adalah terjadi peningkatan sampel pada variabel yang terindikasi multikolinieritas. Oleh karena itu, variabel ebas yang baik adalah variabel yang tidak terindikasi multikolinieritas. Menurut Ghozali (2016) menyebutkan bahwa efek multikolinieritas pada suatu model dapat diketahui dari beberapa aspek berikut :

- a. R^2 memiliki nilai yang tinggi, namun variabel independen yang ada tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen
- b. Jika melihat dari aspek nilai koefisien korelasi antara variabel independen. Maka apabila nilai koefisiennya berada dibawah 0,80 dapat disimpulkan bahwa tidak terindikasi multikolinieritas.
- c. Multikolinieritas juga bisa dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance rendah maka akan menghasilkan nilai VIF yang tinggi, hal ini disebabkan karena nilai VI dihasilkan dari pembagian

antara 1 dengan nilai tolerance. Nilai tolerance akan mengukur tingkat variabilitas variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Model akan terlihat terindikasi multikolinieritas apabila nilai tolerancenya $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 .

Uji multikolinieritas pada penelitian ini akan menggunakan instrument matriks korelasi, yaitu dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel. Bila nilai koefisien korelasi antar variabel lebih dari 0.8 maka model pada penelitian ini terindikasi multikolinieritas dan *vice versa*. Adapun hipotesis yang mendasari pengujian ini adalah :

H_0 : Tidak terdapat multikolinieritas

H_1 : Terdapat multikolinieritas

Jika nilai koefisien relasi setiap variabel independen menunjukkan hasil yang lebih besar dari 0.8 maka tolak H_0 , namun apabila sebaliknya maka terima H_0 , dan tolak H_1 .

3.6.3. Uji Interaksi (*Moderated Regression Analysis*)

Moderated Regression Analysis adalah suatu instrumen pengujian khusus yang dipakai untuk menguji model regresi linear berganda yang memiliki komposisi interaksi didalamnya (perkalian dari dua atau lebih variabel independen), yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel moderating dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, MRA digunakan sebagai alat untuk mengetahui efek moderasi dari variabel korupsi dalam memoderasi hubungan dari

variabel *Gross Domestic Product Percapita* (GDPPC), *Inflasi* (INF) dan *Unemployment* (UEM) terhadap *Human Development Index* (HDI). Menurut Solimun (2017), terdapat 4 kriteria pengambilan keputusan dalam uji interaksi. Pendapat ini juga menjadi acuan peneliti dalam menentukan keputusan dalam pengujian ini. Adapun pedoman kategorisasi yang mendasari pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah :

Tabel 3.6. Kriteira Uji Interaksi

Hasil Uji	Jenis Moderasi
β_2 ; non signifikan β_3 ; signifikan $(\beta_2 \neq 0 ; \beta_3 \neq 0)$	Pure Moderasi Jika variabel moderator tidak berhubungan dengan variabel dependen dan atau variabel independen, tetapi berinteraksi dengan variabel independen
β_2 ;signifikan β_3 ;signifikan $(\beta_2 = \beta_3 \neq 0)$	Quasi moderated Jika variabel moderator berhubungan dengan variabel dependen dan atau variabel independen dan berinteraksi dengan variabel independen
β_2 ,signifikan β_3 ;non signifikan $(\beta_2 \neq 0 ; \beta_3 = 0)$	Predictor Moderated Jika variabel moderasi berhubungan dengan variabel dependen dan/atau variabel independen, tetapi tidak berinteraksi dengan variabel independen

β_2 ; non signifikan β_3 ;non signifikan $(\beta_2 = \beta_3 \neq 0)$	Homoglogiser Moderated Jika variabel moderasi tidak berhubungan dengan variabel dependen dan/atau variaebl independen, dan tidak berinterkasi dengan variaebl independen
---	--

3.6.4. Uji Hipotesis

3.6.4.1.Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau seringkali disebut sebagai uji analisis t adalah suatu instrument pengujian yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial sendiri terkada disebut sebagai uji t karena dalam pengujiannya menggunakan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Atau bisa juga dilakukan dengan membandingkan nilai p-value dari nilai t setiap variabel dengan nilai α . Adapun hipotesis yang digunakan dalam melakukan uji parsial pada peneltian ini adalah :

$H_0: \beta_i = 0$, Secara parsial variabel independen yang digunakan pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Human Development Index (HDI)*

$H_1: \beta_i \neq 0$, Secara parsial variabel independen yang digunakan pada penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Human Development Index (HDI)*

Jika nilai α yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Maka ketentuan dalam pengambilan keputusan pengujian ini adalah sebagai berikut :

Jika p-value $\geq \alpha$ maka terima H_0 dan tolak H_1

Jika p-value $\leq \alpha$ maka tolak H_0 dan terima H_1

3.6.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan adalah suatu metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara simultan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Uji simultan dapat juga disebut sebagai uji F karena dalam pengujiaannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-tabel dengan nilai F- hitung, atau cara lain bisa juga dengan membandingkan nilai dari p-value dari nilai F- hitung dengan nilai α . Adapun hipotesis yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada uji simultan adalah :

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$, berarti secara simultan variabel independen yang digunakan pada penelitian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Human Development Index* (HDI).

$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq \beta_7 \neq \beta_8 \neq 0$, berarti secara simultan variabel independen yang digunakan pada penelitian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Human Development Index* (HDI).

Sedangkan ketentuan dasar pengambilan keputusan dari pengujian ini adalah :

Jika p-value $\geq \alpha$ maka terima H_0 dan tolak H_1

Jika p-value $\leq \alpha$ maka tolak H_0 dan terima H_1

3.6.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya tingkat kemampuan menerangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi juga dipakai sebagai alat ukur untuk menilai kebaikan dari persamaan regresi dalam memberikan persentase variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai dari koefisien determinasi itu sendiri berkisar antara interval 0 hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). Ketentuan yang menjadi dasar pengujian ini adalah sebagai berikut :

Jika nilai R^2 semakin mendekati angka 1, maka variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel independen yang dipakai dalam penelitian.

Jika nilai R^2 semakin menjauhi angka 1, maka variasi variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel independen yang dipakai dalam penelitian.